



# PERJALANAN

# MEMATIKAN

KRISIS PENGUNGI DAN PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA

AMNESTY  
INTERNATIONAL



**Amnesty International adalah gerakan global  
terdiri dari tujuh juta orang lebih yang berkampanye  
untuk dunia yang mana hak asasi manusia (HAM)  
dinikmati oleh semua orang.**

**Visi kami adalah agar setiap orang bisa menikmati  
semua hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal  
Hak Asasi Manusia dan standar HAM internasional  
lainnya. Kami independen dari setiap pengaruh  
pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi  
atau agama dan didanai sebagian besar dari anggota  
kami dan sumbangan publik.**

Hak cipta dilindungi. Publikasi ini dilindungi hak cipta, tapi boleh diproduksi ulang dengan cara apapun tanpa biaya demi kepentingan advokasi, kampanye dan pengajaran, namun tidak untuk dijual. Pemegang hak cipta meminta penggunaan semacam itu agar didaftarkan kepada mereka untuk tujuan analisis dampak. Untuk penyalinan di situasi yang berbeda, atau penggunaan ulang dipublikasi lain, atau untuk penerjemahan atau adaptasi, izin tertulis harus didapat terlebih dahulu dari penerbit, dan kemungkinan ada biaya yang perlu dibayar. Untuk memohon izin, atau pertanyaan lainnya hubungi [copyright@amnesty.org](mailto:copyright@amnesty.org)

© Amnesty International 2015

Dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015 oleh  
by Amnesty International Ltd  
Peter Benenson House, 1 Easton  
Street, London WC1X 0DW, UK

[amnesty.org](http://amnesty.org)

Indeks: ASA 21/2574/2015 Bahasa Indonesia  
Bahasa asli: Inggris  
Dicetak oleh Amnesty International,  
Sekretariat Internasional, Inggris



*Foto sampul depan: Migran Rohingya mengoper makanan yang dijatuhkan oleh helikopter tentara Thailand kepada sesama mereka yang berada di atas perahu di perairan Thailand, dekat Pulau Koh Lipe di Laut Andaman pada 14 Mei 2015. Sebuah perahu dipenuhi sesak sekelompok migran Rohingya—termasuk banyak anak-anak—ditemukan mengapung di perairan Thailand pada 14 Mei, para penumpang berkata beberapa orang telah meninggal dalam beberapa hari sebelumnya. AFP PHOTO / Christophe ARCHAMBAULT  
Sumber Foto: © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images*

**AMNESTY  
INTERNATIONAL** 

# DAFTAR ISI

<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	<b>3</b>
Metodologi .....	5
<b>Bab 1: Latar Belakang Krisis Mei 2015</b> .....	<b>7</b>
<b>Bab 2: Melarikan Diri dari Kengerian di Myanmar</b> .....	<b>10</b>
Persekusi dan Kekerasan yang Meluas .....	10
Kesimpulan .....	14
<b>Bab 3: Dianiaya dan Ditelantarkan di Laut</b> .....	<b>16</b>
Pola Perjalanan .....	16
Penganiayaan Berat di Perahu .....	19
Disandera, Dipukul, dan Dibunuh untuk Tebusan .....	19
Pembunuhan .....	20
Pemukulan dan Perlakuan Buruk Lainnya .....	21
Kondisi Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat .....	22
Perdagangan Manusia para Rohingya .....	24
Kedekatan dan Prevalensi Jaringan Perdagangan Manusia .....	25
Eksplorasi .....	26
Perjalanan Berbiaya Rendah atau Gratis .....	27
Penculikan .....	27
Awak Perahu yang Terorganisir dengan Baik .....	28
Perdagangan Manusia Warga Bangladesh .....	29
Didorong Kembali ke Laut .....	30
Pencarian dan Penyelamatan yang Tidak Memadai .....	31

Kesimpulan .....	32
<b>Bab 4: Tempat Penampungan Sementara di Indonesia .....</b>	<b>35</b>
Respon Awal yang Mengagumkan.....	35
Khawatiran Jangka Panjang .....	37
Kurangnya Dukungan Regional dan Internasional .....	41
Kesimpulan .....	42
<b>Bab 5: Kesimpulan dan Rekomendasi .....</b>	<b>44</b>
Kesimpulan .....	44
Rekomendasi .....	45
Untuk Pemerintah Myanmar.....	45
Untuk Pemerintah Indonesia .....	45
Untuk Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand .....	46
Untuk Pemerintah Bangladesh .....	46
Untuk Pemerintah Australia .....	47
Untuk IOM and UNHCR.....	47
Untuk ASEAN.....	47
Untuk Komunitas Internasional .....	47

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**“Kami merasa sedih ketika kami lihat orang meninggal dan dilempar ke laut. Orang-orang meninggal di darat di Myanmar [...] dan mereka meninggal di laut juga.”**

Anak perempuan berusia 15 tahun, Aceh, Indonesia, 12 Agustus 2015

Pada bulan Mei 2015, tiga perahu yang berisi 1.800 perempuan, laki-laki dan anak-anak mendarat di Aceh, Indonesia. Semua yang tiba berada dalam kondisi ketakutan, kelaparan, dan kecapaian. Mereka menjalani berminggu-minggu atau berbulan-bulan di lautan, di perahu yang dikontrol pedagang manusia yang keji atau penyelundup manusia yang kejam. Perahu-perahu yang mencapai Aceh adalah satu diantara puluhan perahu yang ditelantarkan oleh awak perahunya setelah pihak berwenang Thailand meluncurkan aksi razia pemberantasan perdagangan manusia.

Setelah awak meninggalkan perahu yang terdampar di laut, Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada awalnya mendorong perahu-perahu penuh tersebut dari perairan mereka dan mencegah ribuan orang yang putus asa tersebut dari mendarat. Walau ada beberapa laporan dari Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) dan media tentang perahu-perahu yang butuh pertolongan, pemerintah-pemerintah di wilayah tersebut lambat membentuk operasi pencarian dan penyelamatan. Kejadian di Teluk Bengal dan Laut Andaman serta kesengsaraan mereka yang berada di perahu menarik perhatian media global. Akibat tekanan internasional, Indonesia dan Malaysia mengizinkan orang-orang tersebut mendarat, namun secara tegas mengatakan hanya akan menampung mereka secara sementara. Keputusan membolehkan perahu-perahu tersebut mendarat disambut baik, namun menurut UNHCR ratusan orang mungkin telah meninggal di laut pada saat itu. Namun karena tidak ada cara menelusuri jejak perahu-perahu tersebut, tidak mungkin mengetahui secara pasti dan ada kekhawatiran jumlahnya bisa lebih banyak.

Laporan ini berdasarkan wawancara dengan 179 pencari suaka, serta juga puluhan wawancara lain dengan warga lokal, organisasi masyarakat sipil, pejabat pemerintahan, dan badan internasional. Amnesty International melaksanakan wawancara tersebut pada Agustus 2015. Laporan ini juga mengambil data dari PBB, dan sumber pemerintah dan non-pemerintah tentang lalu lintas perahu tidak resmi di Teluk Bengal dan Laut Andaman.

Kebanyakan orang yang mencapai Indonesia pada Mei 2015 adalah Muslim Rohingya, sebuah kelompok agama dan etnis minoritas dari Myanmar yang didominasi penganut Buddha. Pihak berwenang Myanmar menyangkal keberadaan Rohingya - menyebut mereka sebagai orang Bengal - dan telah menerapkan perundang-undangan diskriminatif yang sebenarnya membuat mayoritas warga Rohingya menjadi tanpa kewarganegaraan. Orang-orang ini telah menjadi korban kekerasan oleh aktor negara dan non-negara selama puluhan tahun, termasuk di tahun 2012, ketika kekerasan sektarian yang keji pecah di Negara Bagian Rakhine di Myanmar Barat, di mana mayoritas Rohingya tinggal. Lebih dari 125.000 Rohingya dan kelompok Muslim lainnya terusir dari rumahnya.

Kesaksian para Rohingya yang diwawancarai di Aceh menunjukkan gambaran mengerikan serangan massa, kematian, dan penghilangan. Seorang guru mengatakan 25 muridnya meninggal ketika berusaha melindunginya dari gerombolan massa; ia menangis sembari menjelaskan tangan salah seorang muridnya putus tertebas pisau panjang. Menimbang skala dan buruknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Amnesty International menganggap hampir semua Rohingya yang berada di luar negaranya sebagai pengungsi.

Namun mereka yang melarikan diri dari Myanmar dengan perahu pada tahun 2015 hanya menukar satu mimpi buruk dengan yang lainnya. Rohingya yang diwawancarai Amnesty International mendeskripsikan kondisi mengejutkan yang mereka alami di laut selama beberapa minggu dan terkadang berbulan-bulan. Orang-orang tersebut mengatakan mereka dipukul berulang kali hingga keluarga mereka membayar tebusan untuk melepas mereka ke perahu yang lain. Amnesty International mewawancarai anak perempuan berusia 15 tahun yang menceritakan bagaimana awak perahu menelepon keluarganya, membuat mereka mendengarnya menangis sembari memukulnya, dan memerintahkan keluarganya membayar tebusan. Mereka yang diwawancarai mengatakan mereka yang tidak bisa membayar ditembak atau dilempar keluar perahu.

Hampir semua Rohingya - perempuan, laki-laki, dan anak-anak - yang berbicara dengan Amnesty International mengatakan mereka telah dipukuli oleh awak perahu atau telah menyaksikan penumpang lainnya dipukul. Orang-orang dipukuli karena bergerak, karena memohon makanan atau minum, atau meminta menggunakan toilet. Anak-anak dipukuli karena menangis. Amnesty International berbicara dengan satu orang yang dipukuli secara keji hingga kehilangan kesadaran hingga beberapa jam, dan masih menderita efek fisik dan psikologis akibat pemukulan tersebut. Semua yang diwawancarai mendeskripsikan kondisi perahu yang masuk kategori tidak manusiawi dan merendahkan martabat, dan orang Indonesia yang menyelamatkan penumpang di salah satu perahu mengatakan baunya sangat buruk hingga mereka tidak bisa masuk perahu tersebut.

Jenis kekerasan mengerikan ini mengubah apa yang dimulai sebagai perjalanan penyelundupan- yang mana orang-orang yang mencari keselamatan secara sukarela masuk ke perahu dengan biaya tertentu - menjadi perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi. Ornop dan jurnalis telah melaporkan perdagangan manusia di Asia Tenggara selama beberapa tahun, walau informasi terperinci tentang mekanisme perdagangan tersebut masih langka. Korban perdagangan manusia ini termasuk pengungsi dari Myanmar dan orang-orang yang melarikan diri dari kemiskinan di negara seperti Bangladesh.

Orang-orang yang diwawancarai Amnesty International di Indonesia telah ditelantarkan oleh

orang-orang yang membawa mereka. Karena perjalanan mereka terganggu ketika mereka sedang transit sebelum sampai ke tujuan mereka (biasanya Malaysia), maka tidak memungkinkan untuk memastikan mereka sedang diperdagangkan untuk situasi kerja paksa atau bentuk eksploitasi lainnya. Namun, karena beberapa faktor, termasuk pemukulan keji untuk mendapatkan uang, Amnesty International memandang kebanyakan - bila tidak semua - Rohingya yang mencapai Aceh pada Mei 2015 adalah korban perdagangan manusia.

Sekitar 1.000 Rohingya di Aceh kini menghadapi masa depan yang tidak menentu. Indonesia telah menyediakan dukungan yang diperlukan - mencurahkan sumber daya nasional dan lokal (Aceh), dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan organisasi internasional demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, para Rohingya masih belum tahu apakah mereka boleh diizinkan menetap lebih dari batas waktu mereka diharapkan pergi pada Mei 2016, atau akankah mereka dipindahkan ke negara tiga (*resettle*). Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Status Pengungsi (*United Nations Convention Relating to the Status of Refugees*), dan tidak memiliki kerangka hukum yang operasional dan jelas serta memadai untuk pengungsi dan pencari suaka. Badan PBB yang mengurus pengungsi - UNHCR - bertanggungjawab untuk semua prosedur penentuan status pengungsi (*refugee status determination*) di Indonesia, dan kini kekurangan staf dan pendanaan.

Musim berlayar di Asia Tenggara mulai berlanjut ketika laporan ini diselesaikan pada Oktober 2015, setelah musim hujan berakhir. Pedagang manusia dan penyelundup bisa dipastikan akan melanjutkan perdagangan mereka dan pelanggaran HAM akan dilakukan lagi di lautan Asia Tenggara.

Amnesty International menyerukan tindakan darurat untuk mengatasi krisis pengungsi dan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Pemerintahan di wilayah tersebut - terutama di Indonesia, Malaysia, dan Thailand - harus bekerjasama membentuk tindakan yang efektif untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi pelanggaran HAM oleh pedagang manusia dan penyelundup. Dan sembari negara menginvestigasi dan membawa ke hadapan pengadilan mereka yang terlibat perdagangan orang, pemerintah juga harus memastikan tindakan penegakan hukum tidak membahayakan nyawa di lautan, atau menjebak orang di Myanmar atau Bangladesh tanpa cara melarikan diri.

Komponen penting upaya penegakkan hukum melawan mereka yang terlibat perdagangan manusia di Teluk Bengal dan Laut Andaman adalah implementasi operasi pencarian dan penyelamatan yang terkoordinasi, dilengkapi dengan prosedur pendaratan yang aman dan bisa diprediksi. Diharuskan bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk belajar dari krisis Mei 2015 agar bisa menghindari masalah serupa di laut.

Komunitas internasional harus menyediakan bantuan teknis dengan pencarian dan penyelamatan maritim, serta pendanaan untuk memastikan penerimaan manusiawi dari orang-orang yang baru saja mendarat dan menolong pengungsi dan warga lokal memenuhi kebutuhan dasar mereka.

## METODOLOGI

Laporan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan delegasi Amnesty International di Indonesia pada Agustus 2015, juga studi pustaka serta komunikasi berkelanjutan melalui

telepon dan email. Delegasi tersebut mengunjungi Blang Adoe dan Kuala Cankoi (Kabupaten Aceh Utara), Bayeun (Kabupaten Aceh Timur), Kuala Langsa (Kota Langsa), dan Gampong Peuntet serta Lhokseumawe di Provinsi Aceh.

Para peneliti berjumpa dengan 115 Rohingya yang tiba di Aceh pada Mei 2015: wawancara dalam kelompok kecil dengan 75 Rohingya; dan tambahan 40 wawancara individual dengan 12 orang lelaki, 14 perempuan, 10 anak lelaki, dan empat anak perempuan. Amnesty International juga mewawancarai tujuh warga Bangladesh yang tiba di Aceh pada Mei 2015. Di Cisarua dan Jakarta, organisasi ini melakukan 34 wawancara mendalam dengan pengungsi dan pencari suaka yang telah berada di Indonesia selama beberapa bulan dan beberapa tahun. Mereka berasal dari berbagai negara, termasuk Afghanistan, Ethiopia, Iran, Myanmar, Pakistan, dan Somalia. Di Kupang, delegasi melakukan wawancara kelompok dengan 30 orang Afghanistan, dan wawancara individual dengan dua orang Afghanistan. Nama semua orang yang diwawancarai - dan dalam beberapa kasus, rincian lainnya - disembunyikan untuk perlindungan mereka.

Amnesty International bertemu dengan pejabat dari berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk perwakilan pemerintah lokal di Kuala Cankoi, Kota Langsa, dan Lhokseumawe di Provinsi Aceh. Para peneliti juga berbicara dengan perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

Delegasi juga bertemu dengan staf dari puluhan organisasi masyarakat sipil di Aceh dan Jakarta, juga dengan organisasi masyarakat sipil internasional dan kelompok kemanusiaan. Di Kuala Cankoi, organisasi ini berbicara dengan warga lokal yang membantu penyelamatan Rohingya pada bulan Mei 2015, serta petugas kesehatan yang merawat mereka segera setelah pendaratan mereka. Sebagai tambahan, Amnesty International juga bertemu dengan staf lokal dan nasional dari International Organization for Migration (IOM) serta dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Amnesty International mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu terlaksananya penelitian ini, khususnya kepada rekanan masyarakat sipil lokal yang menyediakan dukungan dan keahlian yang luar biasa, serta kepada pengungsi dan migran yang bermurah hati dengan waktu dan kesaksian mereka.



# BAB 1: LATAR BELAKANG KRISIS MEI 2015

Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu orang dari Myanmar dan Bangladesh melakukan perjalanan berbahaya menggunakan perahu untuk melarikan diri dari penganiayaan atau kemiskinan. Komisioner Tinggi PBB Untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) memperkirakan bahwa dalam enam bulan pertama tahun 2015, 31.000 orang meninggalkan Teluk Bengal dengan perahu melalui perjalanan tidak resmi.<sup>1</sup> Para penumpang perahu tersebut terdiri dari pencari suaka Rohingya - penduduk Muslim yang sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar yang hidup tertindas - serta orang-orang yang melarikan diri dari kemiskinan di Bangladesh. Pada tahun 2014 sekitar 63.000 orang telah melakukan perjalanan tidak resmi dan berbahaya dengan perahu di Teluk Bengal dan Laut Andaman.<sup>2</sup>

Perjalanan dengan perahu ini diatur oleh jaringan terorganisir pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia. Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar mengatakan bahwa pelanggaran HAM di Myanmar "menghasilkan sejumlah besar pencari suaka dan mendorong penyelundupan dan perdagangan manusia"<sup>3</sup> Setelah kunjungan Pelapor Khusus ke negara itu pada awal tahun 2015, ia mengatakan bahwa orang-orang Rohingya memiliki dua pilihan: "tetap tinggal di situ dan mati, atau meninggalkan negara itu dengan perahu."<sup>4</sup>

Pada awal tahun 2015, perjalanan perahu berbahaya ini menjadi makin berbahaya pasca aksi penumpasan perdagangan manusia di tingkat regional. Pada awal Mei tahun 2015, puluhan makam pengungsi Rohingya dan Bangladesh ditemukan di Thailand, dekat perbatasan Malaysia<sup>5</sup> (setelahnya, masih di bulan yang sama, kuburan juga ditemukan di

---

<sup>1</sup> UNHCR, "UNHCR Urges States to Help Avert Bay of Bengal Boat Crisis in Coming Weeks [UNHCR Desak Negara-Negara untuk Membantu Mencegah Krisis Perahu Teluk Benggala di Minggu-Minggu Selanjutnya]," 28 Agustus 2015, tersedia di <http://www.unhcr.org/55e063359.html>.

<sup>2</sup> UNHCR, IOM dan UNODC, *Bay of Bengal and Andaman Sea: Proposals for Action* [Teluk Benggala dan Laut Andaman: Usulan Tindakan], Mei 2015, tersedia di <http://www.unhcr.org/55682d3b6.html>, hal. 1.

<sup>3</sup> Pelapor Khusus PBB Tentang Situasi HAM di Myanmar, *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar* [Laporan Pelapor Khusus Tentang Situasi HAM di Myanmar], Yanghee Lee, UN Doc. A/HRC/28/72, 23 Maret 2015, tersedia di [http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A\\_HRC\\_28\\_72\\_en.doc](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_72_en.doc), paragraf. 48.

<sup>4</sup> Pusat Berita PBB, "UN Rights Expert Urges Myanmar Authorities to Address Signs of Backtracking [Pakar HAM PBB Mendesak Otoritas Myanmar Untuk Menangani Tanda-Tanda Backtrackin]," 18 Maret 2015, tersedia di <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50364#.Vg-glfVhBd>.

<sup>5</sup> Human Rights Watch, *Thailand: Mass Graves of Rohingya Found in Trafficking Camp* [Thailand: Kuburan massal Rohingya ditemukan di Kamp Perdagangan Manusia], 1 Mei 2015, tersedia di

wilayah Malaysia di sisi perbatasan).<sup>6</sup> Pihak berwenang menyatakan kuburan-kuburan tersebut ditemukan di lokasi kamp-kamp yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia. Pada tanggal 7 Mei, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha memerintahkan untuk dilakukan investigasi jaringan perdagangan manusia, menuntut agar semua kamp dan kuburan ditemukan dalam waktu 10 hari.<sup>7</sup> Mendengar kabar ini, para pelaku perdagangan manusia bereaksi cepat, dan sejak 9 Mei mereka mulai menelantarkan perahu-perahu yang penuh dengan orang di perairan terbuka.<sup>8</sup>

Peristiwa mengerikan dalam minggu-minggu berikutnya menjadi berita utama di dunia, ribuan pengungsi dan migran terlantar di laut dan membutuhkan makanan, air dan perawatan medis.<sup>9</sup> Hanya tiga negara di Asia Tenggara - Kamboja, Filipina, dan Timor-Leste – yang telah meratifikasi Konvensi PBB Tentang Status Pengungsi (Konvensi Pengungsi),<sup>10</sup> dan sebagian besar pemerintah di wilayah tersebut enggan untuk membantu orang-orang yang terlantar di perahu. Awalnya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand terlibat dalam serangkaian operasi "pushback"<sup>11</sup> (mendorong kembali ke laut), di mana pihak berwenang mencegah perahu untuk mendarat dan kadang membawa perahu-perahu itu keluar dari wilayah perairan negara mereka.<sup>12</sup> Skala bencana kemanusiaan ini mengejutkan. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memastikan sebanyak 8.000 orang diperkirakan telah ditelantarkan di laut pada Mei 2015.<sup>13</sup>

Setelah adanya kritik dari tingkat regional dan internasional (termasuk dari Amnesty International),<sup>14</sup> pada 20 Mei pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengubah

---

<https://www.hrw.org/news/2015/05/01/thailand-mass-graves-rohingya-found-trafficking-camp>; Emanuel Stoakes, "Thailand human trafficking death toll far greater than feared, claims rights group" [Jumlah Kematian Perdagangan Manusia Thailand dikhawatirkan lebih besar, ungkap kelompok HAM], *The Guardian*, 6 Mei 2015, tersedia di <http://www.theguardian.com/global-development/2015/may/06/thailand-human-trafficking-mass-grave-burma-rohingya-people>.

<sup>6</sup> Todd Pitman dan Jocelyn Gecker, "Malaysia migrant graves reveal 139 human skeletons at site where Rohingya Muslims 'Kept by traffickers' [139 Kerangka Manusia di Kuburan Migran Malaysia]," *The Independent*, 25 Mei 2015, tersedia di <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/malaysia-migrant-graves-reveal-139-human-skeletons-at-site-where-rohingya-muslims-kept-by-10273915.html>.

<sup>7</sup> *The Nation*, "Ten-Day Deadline to Find Migrant Camps [Batas Waktu 10 Hari Untuk Menemukan Kamp-Kamp Migran]," 7 Mei 2015, tersedia di <http://www.nationmultimedia.com/national/Ten-day-deadline-to-find-migrant-camps-30259476.html>.

<sup>8</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements* [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran Melalui Laut], Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 3.

<sup>9</sup> *International Organization for Migration*, "IOM Appeals for USD 26 million for Migrants in SE Asian Boat Crisis [IOM Mengajukan Dana 26 Juta US Dolar Untuk Migran dalam Krisis Perahu Asia Tenggara]," 26 Mei 2015, tersedia di <http://www.iom.int/news/iom-appeals-usd-26-million-migrants-se-asian-boat-crisis>.

<sup>10</sup> *United Nations Convention Relating to the Status of Refugees* [Konvensi PBB Tentang Status Pengungsi], 28 Juli 1951, [1969] Can. T.S. No. 6 [*Refugee Convention*].

<sup>11</sup> Hal ini kadang secara eufimisme disebut sebagai operasi "bantuan".

<sup>12</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements* [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran Melalui Laut], Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 3-5.

<sup>13</sup> *International Organization for Migration*, "IOM Appeals for USD 26 million for Migrants in SE Asian Boat Crisis [IOM Mengajukan Dana 26 Juta US Dolar Untuk Migran dalam Krisis Perahu Asia Tenggara]," 26 Mei 2015, tersedia di <http://www.iom.int/news/iom-appeals-usd-26-million-migrants-se-asian-boat-crisis>.

<sup>14</sup> Lihat *Amnesty International*, "South East Asia: Immediately Step Up Efforts to Rescue Thousands at Grave Risk at Sea [Asia Tenggara: Secepatnya meningkatkan upaya untuk Menyelamatkan Ribuan Orang yang Berisiko Mati di Laut]," 13 Mei 2015, tersedia di

pendekatan mereka, dan Indonesia dan Malaysia menawarkan "penampungan sementara" hingga 7.000 orang, dengan syarat bahwa pada Mei 2016, para pencari suaka akan dipindahkan kembali ke negara lain (proses di mana negara-negara ketiga menerima pengungsi)<sup>15</sup> dan para migran akan dipulangkan ke negara asalnya.<sup>16</sup> Antara 10 dan 20 Mei 2015, 1.800 orang dari tiga perahu mendarat di Indonesia, dan pada 11 Mei, 1.100 penumpang dari dua perahu mendarat di Malaysia.<sup>17</sup>

Banyak orang kehilangan nyawa mereka selama krisis ini. Pada pertengahan 2015, UNHCR memperkirakan bahwa lebih dari 1.100 orang tewas di Teluk Bengal dan Laut Andaman sejak tahun 2014, termasuk 370 orang tewas antara Januari dan Juni 2015.<sup>18</sup> Lebih dari 1.000 manusia perahu di sepanjang rute ini tetap belum ditemukan.<sup>19</sup> Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang, mungkin telah meninggal karena sengatan matahari, kekerasan, kelaparan, atau tenggelam. Mengingat sulitnya mengukur kematian di laut,<sup>20</sup> skala penuh dari tragedi itu tidak akan pernah diketahui.

Pada saat laporan ini sedang diselesaikan pada pertengahan Oktober 2015, musim hujan telah berakhir, yang memungkinkan ribuan orang lagi untuk mencoba perjalanan berbahaya dengan perahu di Teluk Bengal. Ada resiko serius akan terjadi krisis hak asasi manusia lainnya di laut pada akhir 2015.

---

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/south-east-asia-immediately-step-up-efforts-to-rescue-thousands-at-grave-risk-at-sea/>.

<sup>15</sup> "Resettlement involves the selection and transfer of refugees from a State in which they have sought protection to a third State which has agreed to admit them – as refugees – with permanent residence status. The status provided ensures protection against refoulement and provides a resettled refugee and his/her family or dependants with access to rights similar to those enjoyed by nationals. Resettlement also carries with it the opportunity to eventually become a naturalized citizen of the resettlement country [Perpindahan ke negara ketiga mencakup pemilihan dan pemindahan pengungsi dari negara di mana mereka mencari perlindungan ke negara ketiga yang telah setuju untuk mengakui mereka -sebagai pengungsi- dengan status penduduk permanen. Status ini menjamin perlindungan terhadap *refoulement* [pemulangan secara paksa] dan memberikan akses untuk si pengungsi dan keluarganya atau tanggungannya yang telah dipindahkan ke negara ketiga ini akan hak yang sama dengan hak yang dinikmati oleh warga negara. Perpindahan ke negara ketiga ini juga disertai kesempatan untuk menjadi warga naturalisasi dari negara tersebut pada akhirnya]." UNHCR, *UNHCR Resettlement Handbook*, 2011, tersedia di [www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf](http://www.unhcr.org/46f7c0ee2.pdf).

<sup>16</sup> Ministers of Foreign Affairs of Malaysia, Indonesia and Thailand, *Joint Statement: Ministerial Meeting on Irregular Movement of People in Southeast Asia* [Pernyataan Bersama: Pertemuan Tingkat Menteri Tentang Perpindahan Orang Secara Tak Resmi di Asia Tenggara], 20 Mei 2015, tersedia di <http://reliefweb.int/report/myanmar/joint-statement-ministerial-meeting-irregular-movement-people-southeast-asia>.

<sup>17</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements* [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran Melalui Laut], Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 6.

<sup>18</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements* [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran Melalui Laut], Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 2.

<sup>19</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements* [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran Melalui Laut], Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 1.

<sup>20</sup> IOM, *Fatal Journeys: Tracking Lives Lost during Migration* [Perjalanan Fatal: Menelusuri Nyawa yang Hilang Selama Migrasi], 2014, tersedia di [http://publications.iom.int/bookstore/free/FatalJourneys\\_CountingtheUncounted.pdf](http://publications.iom.int/bookstore/free/FatalJourneys_CountingtheUncounted.pdf), hal. 11.

## **BAB 2: MELARIKAN DIRI DARI KENGERRIAN DI MYANMAR**

**“Pemerintahan orang-orang Buddha mengatakan bahwa tidak ada Muslim yang boleh tinggal di Myanmar. Mereka bilang ‘Pergi ke tempat lain.’ Saya bilang ‘Saya mau pergi.’ Mereka bilang ‘Pergilah ke laut.’”**

Perempuan Rohingya, Aceh, Indonesia, 14 Agustus 2015

Pada Mei 2015 tiga perahu yang membawa 1.800 perempuan, lelaki, dan anak-anak terdampar di Aceh, Indonesia. Perahu ini adalah satu diantara banyak perahu yang telah ditinggalkan oleh awaknya setelah adanya tindakan penumpasan perdagangan manusia di tingkat regional, menyebabkan ribuan penumpang terdampar di laut selama berminggu-minggu. Mayoritas manusia dalam perahu ini adalah orang Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Semua yang terdampar di Aceh berada dalam kondisi lemah karena lapar, kelelahan, dan ketakutan. Mereka telah menderita selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan di laut, di dalam perahu yang dikendalikan oleh pelaku perdagangan atau penyelundupan manusia yang kejam dan kasar. Bab ini membahas kondisi mereka ketika melarikan diri dari Myanmar.

### **PERSEKUSI DAN KEKERASAN YANG MELUAS**

Orang-orang Rohingya, yang beragama Islam, adalah minoritas agama dan etnis dari mayoritas Buddha di Myanmar. Mereka sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pihak berwenang pemerintah menyangkal keberadaan Rohingya, dan merujuk mereka sebagai orang Bengal, menyiratkan bahwa mereka adalah pendatang dari negara tetangga Bangladesh.

Sebagian besar orang Rohingya tak memiliki kewarganegaraan. UU Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982 melucuti kewarganegaraan dari semua (kecuali 40.000 orang) 1,33 juta orang Rohingya di negara itu. Menurut UU ini, hanya individu yang termasuk dalam delapan kelompok "warganegara" dan 135 kelompok "etnis" –lah yang dapat memperoleh kewarganegaraan yang penuh.<sup>21</sup>

Orang Rohingya telah menjadi korban kekerasan aktor negara dan non-negara selama beberapa dekade. Terutama dalam episode brutal ketika dipindahkan secara paksa dengan kekerasan, yang dipimpin oleh militer Myanmar pada tahun 1978 dan 1991, di mana setelahnya 250.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh,<sup>22</sup> dan ketika serangan massa Buddha Rakhine ke masjid-masjid dan sekolah-sekolah Rohingya pada tahun 2001.<sup>23</sup> Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Myanmar menyatakan: "pola pelanggaran hak asasi manusia yang luas dan sistematis di negara bagian Rakhine kemungkinan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefinisikan dalam Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional."<sup>24</sup>

Pada Juni dan Oktober 2012, kekerasan sektarian meletus antara umat Buddha dan Rohingya (serta Muslim lainnya) di negara bagian Rakhine, dipicu oleh perkosaan dan pembunuhan seorang perempuan etnis Burma pada tanggal 28 Mei yang dilakukan tiga lelaki Muslim.<sup>25</sup> Serangan terhadap Rohingya sebagian besar dipimpin oleh warga sipil, rahib Buddha setempat, dan aparat keamanan negara.<sup>26</sup> Sejumlah lebih dari 125.000 Muslim Rohingya dan Muslim lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke kamp pengungsi internal (*Internally Displaced People*) yang penuh sesak dan pelayanannya buruk.<sup>27</sup> Pihak berwenang belum melakukan investigasi yang memadai terhadap kekerasan

---

<sup>21</sup> Amnesty International, *Myanmar: The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied*, [Myanmar: Minoritas Rohingya: Hak-hak dasar disangkal] ASA 16/005/2004, 19 Mei 2004, tersedia di <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA16/005/2004/en/>.

<sup>22</sup> UNHCR, *UNHCR Global Appeal 2012-2013: Bangladesh*, [Permohonan Dana Global UNHCR 2012-2013: Bangladesh] tersedia di <http://www.unhcr.org/4ec231060.html>, hal. 208.

<sup>23</sup> Human Rights Watch, *All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State* [Yang bisa kamu lakukan hanya berdoa: Kejahatan atas kemanusiaan dan pembersihan etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan di Burma], 2013, tersedia di [https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover\\_0.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover_0.pdf), hal. 16.

<sup>24</sup> *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana*, [Laporan Pelapor Khusus PBB tentang situasi HAM di Myanmar], 2 April 2014, UN Doc A/HRC/25/64, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/532068854.html>, paragraf. 51.

<sup>25</sup> Human Rights Watch, *All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State* [Yang bisa kamu lakukan hanya berdoa: Kejahatan atas kemanusiaan dan pembersihan etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan di Burma], 2013, tersedia di [https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover\\_0.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover_0.pdf), hal. 7.

<sup>26</sup> Fortify Rights, *Testimony of Matthew Smith: House Committee on Foreign Affairs* [Kesaksian Matthew Smith: Komite Parlemen untuk Hubungan Luar Negeri], 22 April 2015, tersedia di [http://www.fortifyrights.org/downloads/FR\\_TIP\\_Testimony\\_April\\_2015.pdf](http://www.fortifyrights.org/downloads/FR_TIP_Testimony_April_2015.pdf), hal. 3.

<sup>27</sup> Human Rights Watch, *All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State* [Yang bisa kamu lakukan hanya berdoa: Kejahatan atas kemanusiaan dan pembersihan etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan di Burma], 2013, tersedia di [https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover\\_0.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover_0.pdf), hal. 6.

itu, atau membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan.<sup>28</sup>

Pada kekerasan yang terjadi pada tahun 2012 yang menimbulkan ratusan orang mengungsi, termasuk sebagian besar orang yang diwawancarai Amnesty International di Indonesia pada bulan Agustus 2015. Mereka yang diwawancara menggambarkan kekerasan teror Juni 2012, beberapa dari mereka yang diwawancara menunjukkan tanda-tanda trauma. Dua bersaudara lelaki dan perempuan mengatakan kepada para peneliti Amnesty International: "Di depan kami rumah dibakar dan gadis-gadis dibawa keluar oleh penjaga perbatasan dari blok jalan dan massa Rakhine untuk menjadi sasaran kekerasan seksual di bawah todongan senjata." Sang adik, berumur 15 tahun, mengatakan: "Jika desa kami tidak mengikuti aturan penjaga perbatasan, mereka akan menghina kami, mengatai kami *kala* [istilah merendahkan yang berarti orang asing], dan menendang kami dengan sepatu mereka. Mereka menendang saya berkali-kali, tak terhitung."<sup>29</sup>

Seorang lelaki berusia 25 tahun dari Sittwe mengatakan pada Amnesty International bahwa ia diperingatkan oleh temannya yang juga seorang biksu Buddha bahwa "akan ada masalah yang segera terjadi, dalam waktu dua hari." Lelaki Rohingya itu, yang adalah seorang guru di madrasah lokal (sekolah agama), segera membunyikan bel sekolah dan mendiskusikan dengan siswa dan staf tentang apa yang harus dilakukan. Tapi peringatan itu tidak memberi mereka cukup waktu untuk melakukan persiapan. Dia mengatakan: "desa mulai terbakar hari itu. Setelah massa menyerang, polisi mengeluarkan tembakan ke udara, dan kemudian mulai menembaki warga Rohingya." Ketika menceritakan peristiwa itu, si guru mulai menangis, menjelaskan bahwa hampir 25 muridnya tewas saat mencoba melindungi dirinya dari massa, dan salah satu dari mereka lengannya terpotong karena pisau panjang.<sup>30</sup>

Beberapa orang yang diwawancarai mengatakan bahwa anggota keluarga mereka tewas dan/atau menghilang selama kekerasan di tahun 2012 itu. Seorang pengusaha Rohingya dari *Molek* mengatakan kepada Amnesty International bahwa bibinya yang berusia 50 tahun dibunuh oleh polisi pada Juni 2012; saksi mata mengatakan kepadanya bahwa bibinya ditikam dengan pisau dari samping, dan mayatnya dibawa ke biara tetapi tidak pernah dikembalikan ke keluarganya. Pada sekitar waktu yang sama, dua keponakannya yang masih remaja ditangkap oleh massa dan tidak pernah terlihat lagi. Dia menelepon polisi untuk menanyakan keberadaan keponakannya, tetapi petugas mengatakan padanya: "*Kala*, saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk Anda."<sup>31</sup> Seorang perempuan berusia 19 tahun dari desa Sakki mengatakan bahwa pada Juni 2012 suaminya terluka oleh serangan pisau ketika kekerasan itu terjadi, dan ia percaya bahwa suaminya meninggal: "Kami tidak dapat menemukan mayatnya. Ia menghilang."<sup>32</sup> Seorang perempuan dari desa Santolli mengatakan kepada Amnesty International bahwa anak-anaknya yang berusia delapan dan tujuh tahun menghilang selama kekerasan Juni 2012; ia takut bahwa mereka telah tewas, ia mengatakan:

---

<sup>28</sup> Amnesty International, *Myanmar Must Look Beyond 'Flawed' Report to Stop Cycle of Buddhist-Muslim Violence* [Myanmar harus melihat ke belakang laporan "keliru" untuk menghentikan lingkaran kekerasan Buddhis-Muslim], 20 April 2013, tersedia di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/04/myanmar-government-report-will-not-stop-cycle-buddhist-muslim-violence/>.

<sup>29</sup> Wawancara di Aceh, 12 Agustus 2015.

<sup>30</sup> Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>31</sup> Wawancara di Aceh, 11 Agustus 2015.

<sup>32</sup> Wawancara di Aceh, 12 Agustus 2015.

"Saya tidak pernah melihat mayat mereka"<sup>33</sup>

Selama kekerasan Juni 2012, organisasi HAM melaporkan bahwa meskipun beberapa pasukan keamanan bertindak untuk meminimalkan kekerasan pada orang-orang Rohingya - misalnya dengan mengawal masyarakat untuk pindah ke lokasi yang lebih aman - warga lain memiliki andil atas penghancuran masjid, pemblokiran akses Rohingya pada bantuan kemanusiaan, dan melakukan penangkapan massal yang kejam.<sup>34</sup> Hal ini terungkap dalam kesaksian yang dikumpulkan oleh Amnesty International di Aceh; mereka yang diwawancarai mengatakan bahwa ada saat ketika polisi dan tentara melindungi orang-orang Rohingya dari kekerasan massa, dan ada saat ketika mereka turut serta melakukan kekerasan pada orang-orang Rohingya.

Setelah kekerasan tahun 2012, pemerintah Myanmar terus menganiaya orang-orang Rohingya. Pada tahun 2014, Departemen Penerangan menginstruksikan semua warga Rohingya untuk mendaftarkan diri sebagai orang Bengali, yang secara efektif mengecualikan mereka dari sensus penduduk nasional.<sup>35</sup> Pada Februari 2015, Presiden Thein Sein mengumumkan pencabutan semua *Temporary Registration Certificates* (Sertifikat Pendaftaran Sementara), menyangkal segala bentuk dokumen identitas sebagian besar warga Rohingya dan secara efektif mencegah mereka untuk dapat memilih dalam pemilu mendatang, November 2015.<sup>36</sup> Baru-baru ini pihak berwenang juga telah memberlakukan empat UU "ras dan agama" yang diskriminatif, di bawah tekanan dari organisasi nasionalis Buddha garis keras yang dikenal sebagai Ma Ba Tha (Asosiasi untuk Perlindungan Ras dan Agama).<sup>37</sup>

Saat ini, situasi kemanusiaan bagi warga Rohingya di Myanmar sangatlah suram. PBB memperkirakan bahwa di negara bagian Rakhine, sebanyak 416.600 orang terkena dampak konflik atau kekerasan antar-kelompok dan membutuhkan bantuan kemanusiaan serius,<sup>38</sup> termasuk 140.000 orang yang berada di kamp-kamp pengungsi internal (IDP) di negara bagian Rakhine, serta lainnya yang hidup dalam kondisi menyedihkan dan dengan kebebasan bergerak terbatas.<sup>39</sup> Hingga September 2015, ada lebih dari 98.000 orang yang tinggal di

---

<sup>33</sup> Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>34</sup> Human Rights Watch, *All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma's Arakan State* [Yang bisa kamu lakukan hanya berdoa: Kejahatan atas kemanusiaan dan pembersihan etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Arakan di Burma], 2013, tersedia di: [https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover\\_0.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/burma0413webwcover_0.pdf), hal. 35.

<sup>35</sup> Amnesty International, *Annual Report 2014/15: Myanmar* [Laporan Tahunan 2014/2015], 2015, tersedia di <https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/myanmar/report-myanmar/>.

<sup>36</sup> Amnesty International, "Why are the Rohingya Fleeing Myanmar?" [Kenapa Rohingya melarikan diri dari Myanmar?] 28 Mei 2015, tersedia di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/why-are-the-rohingya-fleeing-myanmar/>.

<sup>37</sup> Amnesty International and the International Commission for Jurists, *Myanmar: Parliament Must Reject Discriminatory 'Race and Religion' Laws* [Myanmar: Parlemen harus menolak Undang-Undang 'Ras dan Agama' yang diskriminatif], ASA 16/1107/2015, 3 Maret 2015, tersedia di <https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/1107/2015/my/>.

<sup>38</sup> UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *2015 Humanitarian Response Plan: Myanmar* [Rencana Respon Kemanusiaan: Myanmar], 12 Desember 2014, tersedia di <http://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-response-plan-2015>.

<sup>39</sup> UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *Myanmar: Crisis Overview* [Myanmar: Peninjauan tentang Krisis], 2015, tersedia di <http://www.unocha.org/myanmar/about-ocha-myanmar/crisis-overview-0>.

21 kamp-kamp IDP di kota Sittwe (negara bagian Rakhine) saja.<sup>40</sup>

Di luar dari warga Rohingya yang dianiaya di Myanmar, ribuan Rohingya lainnya juga hidup di Bangladesh dalam kondisi sangat miskin. Pada tahun 2012 PBB memperkirakan bahwa lebih dari 29.000 pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh, terkonsentrasi khususnya di dua kamp, Kutupalong dan Nayapara, di Distrik Cox Bazar.<sup>41</sup> UNHCR mengatakan bahwa kondisi hidup para pengungsi di kamp-kamp ini tidak memenuhi standar minimum internasional, dengan 17% dari anak usia enam bulan sampai lima tahun, dan 15% dari ibu hamil, menderita kekurangan gizi akut.<sup>42</sup> Lebih dari itu, Pemerintah Bangladesh memperkirakan bahwa mereka menampung 200.000 "orang yang menjadi perhatian"<sup>43</sup> yang tak terdaftar dari Myanmar -banyak dari mereka adalah orang Rohingya.<sup>44</sup> Sebagian besar mereka yang tinggal di pemukiman informal ini tidak menerima bantuan kemanusiaan.<sup>45</sup> Ketika di Aceh, Amnesty International bertemu beberapa orang Rohingya yang bertolak dari Bangladesh, termasuk seorang lelaki 23 tahun dari kota Buthidaung yang telah tinggal di Teknaf, Bangladesh selama 10 tahun. Lelaki itu mengatakan bahwa ia melarikan diri karena "disana tidak ada kebebasan [...] sama dengan Myanmar."<sup>46</sup>

## KESIMPULAN

Penganiayaan dan kekerasan terjadi secara meluas terhadap Rohingya di Myanmar. Mengingat skala dan tingkat buruknya pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, mayoritas orang Rohingya di luar negerinya cenderung berstatus pengungsi. Seperti disebutkan di atas, hanya tiga negara di Asia Tenggara - Kamboja, Filipina, dan Timor-Leste - yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi; instrumen ini menetapkan sistem perlindungan internasional di dunia untuk pengungsi, dan harus diratifikasi oleh negara-negara lainnya di kawasan itu.

---

<sup>40</sup> UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, *Myanmar: Internal Displacement in Rakhine State (Aug 2015)* [Myanmar: Pengungsian internal di Negara Bagian Rakhine], 8 September 2015, tersedia di

[http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Affected\\_Map\\_IDP\\_Sites\\_Rakhine\\_OCHA\\_Aug2015\\_A4.pdf](http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Affected_Map_IDP_Sites_Rakhine_OCHA_Aug2015_A4.pdf).

<sup>41</sup> UNHCR, *UNHCR Global Appeal 2012-2013: Bangladesh* [Permohonan Dana Global UNHCR 2012-2013: Bangladesh], tersedia di <http://www.unhcr.org/4ec231060.html>, hal. 208.

<sup>42</sup> UNHCR, *UNHCR Global Appeal 2012-2013: Bangladesh* [Permohonan Dana Global UNHCR 2012-2013: Bangladesh], tersedia di <http://www.unhcr.org/4ec231060.html>, hal. 209.

<sup>43</sup> Orang yang menjadi perhatian "berisikan secara umum lima kategori orang yang jatuh dalam kompetensi Komisioner Tinggi. Kelompok ini adalah (a) mereka yang masuk dalam kategori definisi Statuta/ Konvensi 1951 sehingga berhak menikmati serangkaian fungsi dari kantor tersebut; (b) mereka yang berada dalam kategori lebih luas namun diakui negara berhak atas perlindungan dan bantuan kantor; (c) mereka yang Komisioner Tinggi berikan "itikad baik kantor", terutama namun bukan saja untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan; (d) pengungsi yang kembali, yang mana Komisioner Tinggi bisa menyediakan bantuan reintegrasi dan perlindungan lainnya; dan (e) orang tanpa kewarganegaraan yang bukan pengungsi yang mana UNHCR memiliki mandat terbatas untuk membantunya." UNHCR, *Protection of Persons of Concern to UNHCR Who Fall Outside the 1951 Convention: A Discussion Note*, [Perlindungan orang yang menjadi perhatian UNHCR yang jatuh diluar Konvensi 1951: Sebuah catatan diskusi] 2 April 1992, tersedia di <http://www.unhcr.org/3ae68cc518.html>, paragraf. 11.

<sup>44</sup> Dikutip di UNHCR, *UNHCR Global Appeal 2012-2013: Bangladesh* [Permohonan Dana Global UNHCR 2012-2013: Bangladesh], tersedia di <http://www.unhcr.org/4ec231060.html>, hal. 208.

<sup>45</sup> Refugees International, "Where We Work: Bangladesh" [Dimana kami bekerja: Bangladesh], 2015, tersedia di <https://www.refintl.org/where-we-work/asia/bangladesh>.

<sup>46</sup> Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015.

Untuk sementara, terlepas dari apakah suatu negara telah meratifikasi Konvensi Pengungsi, ia tetap terikat oleh prinsip *non-refoulement* (perlindungan dari pemulangan paksa).<sup>47</sup> Ini adalah prinsip hukum internasional yang melarang pemindahan individu ke negara atau yurisdiksi lain di mana mereka akan menghadapi risiko nyata pelanggaran HAM serius.<sup>48</sup> Larangan *refoulement* pada penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya telah berstatus hukum kebiasaan internasional, yang berarti bahwa hal itu mengikat semua negara, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi instrumen internasional yang relevan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> UNHCR, IOM dan UNODC, *Bay of Bengal and Andaman Sea: Proposals for Action* [Teluk Bengal dan Laut Andaman: Usulan Aksi], Mei 2015, tersedia di <http://www.unhcr.org/55682d3b6.html>, hal. 4-5.

<sup>48</sup> *Konvensi Pengungsi*, Pasal. 33(1); Konvensi Menentang Penyiksaan dan Tindakan serta Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat, 10 Desember 1984, [1987] 1465 U.N.T.S. 113, hal.85, Pasal. 3(1); Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, Pasal. 16(1).

<sup>49</sup> UNHCR, *The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law: Response to the Questions Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93*, [Prinsip *Non-Refoulement* sebagai norma Hukum Kebiasaan Internasional: respon terhadap pertanyaan yang diajukan ke UNHCR oleh Mahkamah Konstitusi Federal Republik Federal Jerman dalam Kasus 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93], 31 Januari 1994; UNHCR, *Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol* [Opini Saran untuk penerapan ekstra-teritorial kewajiban *Non-Refoulement* berdasarkan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967], 26 Januari 2007, paragraf. 15; *Conclusion No. 6 (XXVIII) Non-refoulement*, ExCom, UNHCR, 28th Session, 1977, para. (a); Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Bethlehem, "The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion" [Cakupan dan Isi Prinsip *Non-Refoulement*], dalam *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection* (Diedit oleh Erika Feller, Volker Türk dan Frances Nicholson, Cambridge University Press, 2003), paragraf. 216.

## BAB 3: DIANIAYA DAN DITELANTARKAN DI LAUT

**“Saya dipukuli karena uang. Saya dipukul lima kali setiap pagi. Saya beruntung.”**

Anak perempuan Rohingya berusia 15 tahun mendeskripsikan penganiayaan yang dialami di laut, 16 Agustus 2015

### POLA PERJALANAN

Amnesty International mengumpulkan kesaksian dari wawancara para Rohingya (perempuan, laki-laki, dan anak-anak), yang datang dari berbagai lokasi di Myanmar atau Bangladesh, dan telah menghabiskan waktu dalam serangkaian perjalanan perahu sebelum akhirnya mencapai Indonesia. Walau kenyataannya orang-orang ini berpergian dalam perahu yang berbeda dengan awak perahu yang berlainan, mereka menyampaikan cerita yang mirip tentang pengalaman mereka di atas perahu, sebagaimana juga penganiayaan hak asasi manusia yang mereka alami di tangan para awak selama perjalanan mereka.

Di Myanmar atau Bangladesh, kebanyakan Rohingya tersebut dihampiri oleh orang lokal yang menawarkan membawa mereka pergi ke Malaysia. Sering biaya perjalanannya kecil, dan terkadang tanpa biaya. Para Rohingya semua memulai perjalanan dalam perahu kecil, memuat beberapa hingga beberapa puluh orang, dan kemudian dipindahkan ke perahu yang lebih besar yang menunggu sedikit jauh di lautan, memuat beberapa ratus penumpang. Beberapa orang yang diwawancara mengalami perpindahan beberapa kali, melalui berbagai perahu yang berbeda; tidak jelas kenapa perpindahan ini terjadi, atau ada pertukaran uang terjadi antar awak perahu. Menurut mereka yang diwawancarai, awak perahu ini berasal dari Bangladesh, Myanmar, dan Thailand. Hampir semua Rohingya memberitahu Amnesty International jika mereka menyaksikan atau mengalami perlakuan mengerikan di laut, termasuk pembunuhan dan pemukulan (kasus-kasus ini akan dijabarkan secara rinci di bawah). Banyak dari mereka yang diwawancara mengatakan sepanjang perjalanan mereka melihat perahu yang mirip dengan mereka, masing-masing berisikan ratusan orang.

Rohingya di Aceh telah menghabiskan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan di laut. Berdasarkan wawancara dengan 600 Rohingya yang mencapai Indonesia pada Mei

2015, UNHCR mengkalkulasi mereka menghabiskan waktu rata-rata 76 hari di lautan.<sup>50</sup> Rohingya yang diwawancarai yang bersama dalam satu perahu ketika mencapai Indonesia mengatakan pada Amnesty International bila mereka menghabiskan antara dua hingga empat bulan dalam perahu yang terakhir, walau mereka bisa jadi telah berada di laut untuk jangka waktu yang lebih lama.<sup>51</sup>

Walau beberapa Rohingya mengatakan pada Amnesty International mereka meninggalkan Myanmar tanpa pengetahuan yang jelas akan kemana, semua dengan tujuan yang jelas memberitahu delegasi Amnesty International bahwa mereka hendak menuju ke Malaysia. Negara ini adalah salah satu negara tujuan utama di Asia Tenggara - kebanyakan migrasi ini tidak resmi, dan negara tersebut menjamu antara 1.9 hingga 5 juta pekerja migran tidak resmi.<sup>52</sup>

Amnesty International berbicara dengan sejumlah anak tanpa pendamping yang berusaha mencapai Malaysia untuk bekerja. Beberapa dari mereka adalah pencari nafkah tunggal bagi keluarga mereka di Myanmar dan berharap bergabung dengan sanak keluarga yang sedang bekerja di Malaysia. Seorang anak lelaki tanpa pendamping berusia 15 tahun sedang berusaha mencapai sepupunya yang berusia 16 tahun. Upah yang dia harap akan didapatkan direncanakan untuk menopang keluarganya di Maungdaw (Negara bagian Rakhine): orangtua, lima saudara laki-laki dan enam saudara perempuan.<sup>53</sup> Sekelompok perempuan Rohingya mengatakan pada Amnesty International kalau mereka ingin bergabung dengan suami atau tunangan mereka. Seorang perempuan berkata: "Kami takut akan dimasukkan penjara ketika pertama kali tiba [di Indonesia]. Kami tidak tahu di mana kami. Namun sekarang perasaan kami adalah: kapan kami bisa bergabung dengan keluarga kami, suami kami?"<sup>54</sup>

## TERBONGKARNYA KAMP PERDAGANGAN MANUSIA DAN KUBURAN DI THAILAND DAN MALAYSIA PADA MEI 2015

Sebuah investigasi oleh kantor berita Reuters mengungkapkan bahwa pada **1 Mei 2015** seorang penyintas perdagangan manusia Rohingya<sup>55</sup> mengarahkan gugus tugas militer-polisi Thailand ke kamp yang biasa digunakan pedagang manusia di Thailand Selatan, beberapa ratus meter dari perbatasan Malaysia.<sup>56</sup> Polisi menemukan setidaknya 30 mayat dikubur di kuburan dangkal, juga kandang bambu buatan, bukti orang-orang ditahan di kandang tersebut dan tanda-tanda kamp tersebut dievakuasi beberapa hari sebelumnya.<sup>57</sup>

<sup>50</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran di Laut]*, Juni/Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 5.

<sup>51</sup> Wawancara di Aceh, 12 Agustus 2015, 14 Agustus 2015.

<sup>52</sup> UN Office on Drugs and Crime, *Migrant Smuggling in Asia: Current Trends and Challenges* [Penyelundupan Migran di Asia: Tren dan Tantangan terkini] April 2015, tersedia di [https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2015/som/Current\\_Trends\\_and\\_Related\\_Challenges\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/Publications/2015/som/Current_Trends_and_Related_Challenges_web.pdf), hal. 57.

<sup>53</sup> Wawancara di Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>54</sup> Wawancara di Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>55</sup> Pembahasan tentang perdagangan manusia, dan perbedaan antara perdagangan manusia dan penyelundupan, akan dibahas nanti di bab ini.

<sup>56</sup> Amy Sawitta Lefevre dan Andrew Marshall, "Special Report - Inside Thailand's Trafficking Crackdown," [Laporan Khusus- didalam Pemberantasan Perdagangan Manusia di Thailand], Reuters, 9 Juli 2015, tersedia di [www.reuters.com/article/2015/07/09/uk-thailand-trafficking-specialreport-idUKKCNOPJ13V20150709](http://www.reuters.com/article/2015/07/09/uk-thailand-trafficking-specialreport-idUKKCNOPJ13V20150709).

<sup>57</sup> ABC News, "Mass Grave Believed to Belong to Migrants Found in Southern Thailand, Officials Say"

Dua kamp lain ditemukan dalam rentang waktu empat hari, dan pihak berwenang Thailand menemukan beberapa penyintas dalam kondisi kesehatan yang buruk. Informasi yang didapatkan dari para penyintas mengindikasikan Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh, juga warga negara Bangladesh, telah diperdagangkan, ditahan, dan dianiaya hingga keluarga mereka bisa membayar tebusan untuk pembebasan mereka. Namun, para penyintas mengatakan banyak orang yang meninggal karena kelaparan, penyakit atau pemukulan ketika menunggu pembayaran keluarga.<sup>58</sup> Pada **4 Mei 2015**, Polisi Thailand menangkap tiga petugas Thailand dengan tuduhan terlibat perdagangan manusia, dan tuntutan diarahkan kepada makelar yang diduga bertanggungjawab mengoperasikan kamp perdagangan manusia.<sup>59</sup>

*The Arakan Project*, sebuah Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) yang memonitor perlintasan perahu di Teluk Bengal dan Laut Andaman, menyatakan pada **5 Mei 2015** ketika serbuan oleh polisi mencari pedagang manusia meningkat, para pedagang manusia memindahkan kamp mereka dan menelantarkan mereka yang terlalu sakit untuk berjalan. Chris Lewa dari Arakan Project mengatakan pada media ada “kondisi leher botol besar di laut” menciptakan situasi yang lebih berbahaya, karena pedagang manusia telah berubah pola dengan menahan ribuan orang di perahu-perahu di perairan internasional ketimbang mengambil risiko dengan membawa mereka ke Thailand.<sup>60</sup>

Pada **7 Mei 2015**, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha memerintahkan pihak berwenang lokal di semua provinsi untuk “memusnahkan” semua kamp Rohingya dan aktivitas terkaitnya di wilayah mereka dalam 10 hari.<sup>61</sup> Pada **9 Mei 2015**, Arakan Project melaporkan para pedagang manusia telah menelantarkan beberapa perahu, mengakibatkan ribuan orang kemungkinan terdampar di lautan.<sup>62</sup>

Jendral Polisi Somyot Poompanmuang, Kepala Kepolisian Kerajaan Thailand, mengumumkan pada **25 Mei 2015** sekitar 50 polisi telah “dipindahtugaskan” karena dugaan keterlibatan dengan jaringan perdagangan

---

[Kuburan masal dipercaya milik migran ditemukan di Thailand Selatan, ungkap pihak berwenang], 1 Mei 2015, tersedia di [www.abc.net.au/news/2015-05-01/mass-grave-of-migrants-found-in-south-thailand-rescuer-says/6439028](http://www.abc.net.au/news/2015-05-01/mass-grave-of-migrants-found-in-south-thailand-rescuer-says/6439028); Human Rights Watch, “Thailand: Mass Graves of Rohingya Found in Trafficking Camp” [Thailand: Kuburan Masal Rohingya ditemukan di kamp perdagangan manusia], 1 Mei 2015, tersedia di [www.hrw.org/news/2015/05/01/thailand-mass-graves-rohingya-found-trafficking-camp](http://www.hrw.org/news/2015/05/01/thailand-mass-graves-rohingya-found-trafficking-camp).

<sup>58</sup> Bangkok Post, “Thailand Trafficking Death Camp ‘Just the Tip of the Iceberg’” [Kamp Kematian Perdagangan Manusia Thailand hanya ujung dari gunung es], 4 Mei 2015, tersedia di [www.ucaenews.com/news/thailand-trafficking-death-camp-just-the-tip-of-the-iceberg/73507](http://www.ucaenews.com/news/thailand-trafficking-death-camp-just-the-tip-of-the-iceberg/73507), Al Jazeera America, “Thai Police Find New Human Trafficking Camps” [Polisi Thailand menemukan Kamp Perdagangan Manusia baru], 5 Mei 2015, tersedia di <http://america.aljazeera.com/articles/2015/5/5/thai-police-find-new-human-trafficker-camps.html>; Terry Fredrickson, “Border Camp Horrors Revealed, Official Arrested (Updated)” [Horor Kamp di Perbatasan terungkap, pejabat ditangkap], *Bangkok Post*, 4 Mei 2015, tersedia di <http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/549355/suspected-migrant-graveyard-discovered-in-songkhla>.

<sup>59</sup> Al Jazeera America, “Thai Police Arrest Man Suspected of Running Deadly Jungle Camp” [Polisi Thailand menangkap orang yang diduga mengelola Kamp Kematian di hutan], 4 Mei 2015, tersedia di <http://america.aljazeera.com/articles/2015/5/4/thai-police-arrest-rohingya-man-suspected-of-running-deadly-jungle-camp.html>.

<sup>60</sup> Jerome Taylor, “Thai People Smuggling Crackdown Creates Fresh Dangers” [Pemberantasan Perdagangan Manusia Thailand menciptakan bahaya baru], AFP, 5 Mei 2015, tersedia di <http://www.ucaenews.com/news/thai-people-smuggling-crackdown-creates-fresh-dangers/73518>.

<sup>61</sup> Bangkok Post, “PM Orders Camp Cleanup” [Perdana Menteri Thailand memerintahkan pembersihan kamp], 7 Mei 2015, tersedia di [www.bangkokpost.com/news/politics/553247/pm-orders-camp-cleanup](http://www.bangkokpost.com/news/politics/553247/pm-orders-camp-cleanup).

<sup>62</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran di Laut]*, Juni 2015, tersedia di <http://www.unhcr.org/554c6a746.html>.

manusia.<sup>63</sup>

Pihak berwenang Malaysia membawa reporter ke kamp yang ditelantarkan di Malaysia Utara (berbatasan dengan Thailand) pada **26 Mei 2015**, yang berisikan apa yang diduga sebagai lubang penahanan dengan kawat duri, tiang jaga dan tangki air besar- semua mengindikasikan orang-orang telah ditahan disana. Pihak berwenang menggali mayat dari 37 kuburan dangkal yang ditemukan dekat kamp. Situs ini adalah satu dari dimana pihak berwenang Malaysia telah, per Mei 2015, mengidentifikasi 139 kuburan yang dipercaya berisikan jenazah migran dan pencari suaka, termasuk para Rohingya.<sup>64</sup> Pihak berwenang Malaysia mengatakan pada reporter beberapa dari sekitar 28 kamp yang mereka temukan sepanjang 50 km dekat perbatasan Thailand telah digunakan sejak 2013, dan dua kamp telah ditelantarkan dua atau tiga minggu sebelumnya (bersamaan dengan waktu Thailand meluncurkan razia pemberantasan perdagangan manusia). Pada **27 Mei 2015**, Malaysia menahan 12 petugas polisi dengan dugaan keterlibatan dalam perdagangan manusia.<sup>65</sup>

## PENGANIAYAAN BERAT DI PERAHU

Rohingya yang diwawancara di Aceh menceritakan pada Amnesty International bagaimana perlakuan mengerikan yang mereka alami dan saksikan di laut.

### DISANDERA, DIPUKUL, DAN DIBUNUH UNTUK TEBUSAN

Beberapa Rohingya menceritakan pada Amnesty International dalam satu titik dalam perjalanannya, mereka dibawa ke perahu yang besar dan memiliki beberapa lantai, mereka dipukuli berulang kali hingga kerabat mereka membayar sejumlah uang untuk pembebasan mereka- baik di perahu lain yang mana penganiayaan menjadi kurang buruk atau lebih jarang, dan dimana mereka berharap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, atau langsung di daratan di Malaysia. Tidak jelas jika ada satu atau lebih perahu besar yang mana pemukulan untuk tebusan ini terjadi, dan jika lebih, ada berapa banyak mereka.

Seorang lelaki Rohingya berusia 20 tahun dari Nagir Para mengatakan ia menghabiskan delapan bulan di perahu yang sangat besar dan melepas jangkar di lepas pantai Thailand, bersama 1.500 orang Rohingya dan Bangladesh. Ia mengatakan pada Amnesty International bila ia dipukuli berulang kali dengan pipa plastik pendek berisi besi, dan menunjukkan pada para delegasi sejumlah luka. Para pedagang manusia menuntut 7.500 Ringgit (setara dengan 1.700 USD), yang keluarganya bayarkan dengan mengirim uang ke sebuah nomor rekening

---

<sup>63</sup> ABC News, "Over 50 Thai Police Officers Punished Over Suspected Links to Human Trafficking Networks" [Lebih dari 50 polisi Thailand dihukum akibat diduga terkait dengan jaringan perdagangan manusia], 25 Mei 2015, tersedia di [www.abc.net.au/news/2015-05-07/over-50-thai-police-punished-over-links-to-human-trafficking/6453326](http://www.abc.net.au/news/2015-05-07/over-50-thai-police-punished-over-links-to-human-trafficking/6453326).

<sup>64</sup> Chris Buckley dan Thomas Fuller, "Jungle Camp in Malaysia Yields Graves and Signs of Migrant Abuse" [Kamp Hutan di Malaysia menunjukkan kuburan dan tanda penganiayaan migran], *New York Times*, 26 Mei 2015, tersedia di [www.nytimes.com/2015/05/27/world/asia/jungle-camp-in-malaysia-yields-graves-and-signs-of-migrant-abuse.html](http://www.nytimes.com/2015/05/27/world/asia/jungle-camp-in-malaysia-yields-graves-and-signs-of-migrant-abuse.html).

<sup>65</sup> ABC News, "Malaysian Police Begin Exhuming Bodies at Jungle Camps Near Thai Border; Air, Sea Operation Launched to Rescue Abandoned Migrants" [Polisi Malaysia mulai mengangkat mayat di Kamp Hutan dekat Perbatasan Thailand; Operasi udara dan laut diluncurkan untuk menyelamatkan migran yang terlantar], 27 Mei 2015, tersedia di [www.abc.net.au/news/2015-05-26/malaysian-police-begin-exhuming-bodies-at-jungle-camps/6498930](http://www.abc.net.au/news/2015-05-26/malaysian-police-begin-exhuming-bodies-at-jungle-camps/6498930); ABC News, "Malaysia Detains 12 Police Officials in Thai Border People-Smuggling Camps Probe" [Malaysia menahan 12 polisi di perbatasan Thailand dalam penyelidikan Kamp Penyelundup], 27 Mei 2015, tersedia di <http://www.abc.net.au/news/2015-05-27/malaysia-detains-12-police-in-people-smuggling-camps-probe/6502596>.

bank, setelah meminjam sejumlah uang dari warga desa lainnya. Ia dibawa dengan perahu motor cepat dengan dua anak muda lainnya dan dipindahkan ke perahu lain, yang akhirnya mencapai Indonesia pada Mei 2015.

Dua anak muda yang menemaninya membayar jumlah tebusan yang sama untuk keluar dari perahu besar yang sama, dan mendeskripsikan pengalaman yang mirip kepada Amnesty International.<sup>66</sup>

Seorang perempuan Rohingya 15 tahun mengatakan awak perahu meminta jumlah yang mirip agar ia dilepas dari perahu besar tempat ia sering dipukul; ia berkata awak perahu menelepon ayahnya di Kamp Pengungsi Kutupalong di Bangladesh, membuatnya mendengarkannya menangis sembari dipukul, dan menyuruhnya membayar mereka 7.500 Ringgit Malaysia.<sup>67</sup>

Seorang lelaki Rohingya berusia 22 tahun dari Desa Paiké Therani, mengatakan ia dipukul dan disekap untuk tebusan dalam sebuah perahu besar selama enam bulan,<sup>68</sup> sebagaimana juga seorang lelaki berusia 18 tahun yang dipukul berulang kali di sebuah perahu besar, sampai pamannya membayar pelepasan dirinya.<sup>69</sup>

Seorang Pria Rohingya berusia 23 tahun dari Bangladesh mengatakan ia disekap di perahu besar di perairan Thailand selama satu setengah bulan; keluarganya harus membayar 150.000 Myanmar Kyat (sekitar 110 USD) agar ia ditransfer ke perahu lain.<sup>70</sup>

Seorang pemuda Rohingya berusia 17 tahun dari Kamp Nayapara di Bangladesh berkata ia menyaksikan seorang lelaki ditembak dan dibuang ke laut setelah keluarganya tidak bisa membayar tebusan dalam kurun waktu sebuah bulan yang ditentukan oleh awak perahu.<sup>71</sup>

## PEMBUNUHAN

Beberapa Rohingya yang menghabiskan waktu di beberapa perahu yang berbeda mengatakan pada Amnesty International jika mereka melihat awak perahu membunuh penumpang. Seorang pemuda berusia 22 tahun dari Desa Paiké Therani mengatakan pada Amnesty International: "Jika seseorang sakit atau mereka tidak bisa bayar [tebusan], mereka dibunuh-terkadang ditembak dulu, terkadang langsung dilempar ke laut."<sup>72</sup> Seorang pemuda Rohingya berusia 15 tahun dari Myanmar dan perempuan Rohingya berusia 35 tahun dari kamp Pengungsi Musoni di Bangladesh, yang diwawancarai terpisah, mengatakan pada Amnesty International bahwa mereka melihat orang dilempar ke laut dalam beberapa kesempatan; para korban dibawa kembali ke atas perahu setelah dua atau tiga jam- walau ada beberapa yang selamat, yang lain tenggelam.<sup>73</sup> Tidak jelas kenapa orang-orang tersebut dilempar keluar perahu.

---

<sup>66</sup> Wawancara di Aceh, 11 Agustus 2015.

<sup>67</sup> Wawancara di Aceh, 16 Agustus 2015.

<sup>68</sup> Wawancara di Aceh, 11 Agustus 2015.

<sup>69</sup> Wawancara di Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>70</sup> Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>71</sup> Wawancara di Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>72</sup> Wawancara di Aceh, 11 Agustus 2015.

<sup>73</sup> Wawancara di Aceh, 15 Agustus 2015, 16 Agustus 2015.

Penumpang lain dilaporkan meninggal karena kurangnya air. Seorang anak perempuan Rohingya berusia 15 tahun berkata: "Saya melihat orang mati karena dehidrasi. Ketika seseorang meninggal mereka diberikan upacara oleh yang lain di perahu kemudian dibuang ke laut oleh awak perahu."<sup>74</sup> Saudara lelakinya, yang berpergian dengannya, mengatakan pada Amnesty International, mereka melihat empat atau lima orang meninggal. Tidak jelas kenapa beberapa orang meninggal sementara yang lain selamat.

#### PEMUKULAN DAN PERLAKUAN BURUK LAINNYA

Hampir setiap Rohingya - perempuan, laki-laki, dan anak-anak- yang berbicara dengan Amnesty International berkata mereka telah dipukul oleh awak perahu atau menyaksikan penumpang lainnya dipukul. Orang-orang dipukul karena bergerak, karena memohon makanan atau minum, dan karena meminta menggunakan toilet. Anak-anak dipukul karena menangis. Seorang bibi dari seorang anak perempuan, yang menderita penyakit kejiwaan, dipukul karena tidak bisa diam.<sup>75</sup> Pemukulan dilakukan dengan tongkat plastik atau besi, juga dengan potongan karet dari ban.

Sangat mengejutkan berapa banyak pemukulan terjadi secara rutin, hampir situasi yang mekanis. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun mengatakan pada Amnesty International bahwa awak perahu memukulnya lima kali setiap pagi,<sup>76</sup> juga seorang ibu muda yang disekap dalam perahu besar selama enam bulan.<sup>77</sup> Mirip dengan mereka, seorang anak lelaki tanpa pendamping berusia 15 tahun berkata: "Pagi hari kamu dipukul tiga kali. Di sore hari dipukul tiga kali. Malam hari kamu dipukul sembilan kali."<sup>78</sup> Anak lelaki ini mengatakan pada Amnesty International dalam kurun waktu sebulan, awak kapal telah melemparnya ke laut 15 kali, untuk beberapa jam setiap kali: "Mereka melempar kami ke laut. Kami harus berenang berjam-jam - jika kami berusaha berpegangan pada perahu mereka akan pukul kami. Jika kami nyaris tenggelam mereka akan tarik kami ke perahu dan dipukul."<sup>79</sup>

Penganiayaan fisik mengakibatkan beberapa orang mengalami permasalahan kesehatan jangka panjang. Banyak orang yang diwawancara Amnesty International menunjukkan luka hasil pemukulan para awak perahu (lihat foto terlampir). Seorang anak lelaki berusia 15 tahun berkata ia masih mengalami sakit di pinggul dan dadanya akibat pemukulan yang dialami.<sup>80</sup> Seorang lelaki berusia 18 tahun mengungkapkan: "Lukanya hilang, tapi punggung saya masih sakit setiap saya berdiri."<sup>81</sup> Amnesty International mendengar pemukulan kejam tertentu, yang dikonfirmasi secara independen oleh dua saksi, yang mana awak perahu memukuli seorang penumpang hingga hilang kesadaran selama beberapa jam. Korban, yang berbicara dengan delegasi Amnesty International, masih menderita efek fisik dan psikologis akibat pemukulan.<sup>82</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara di Aceh, 11 Agustus 2015.

<sup>75</sup> Wawancara di Aceh, 11 Agustus 2015.

<sup>76</sup> Wawancara di Aceh, 16 Agustus 2015.

<sup>77</sup> Wawancara di Aceh, 16 Agustus 2015.

<sup>78</sup> Wawancara di Aceh, 15 Agustus 2015.

<sup>79</sup> Wawancara di Aceh, 15 Agustus 2015.

<sup>80</sup> Wawancara di Aceh, 15 Agustus 2015.

<sup>81</sup> Wawancara di Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>82</sup> Rincian lebih jauh tentang serangan tersebut disimpan untuk melindungi mereka yang diwawancara. Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diungkap mereka yang diwawancarai soal penganiayaan fisik dan kehamilan, Amnesty International juga khawatir beberapa orang di atas perahu menjadi korban perkosaan dan bentuk lain kekerasan seksual. Namun tidak mungkin menanyakan secara rinci tentang masalah ini karena situasi wawancara yang tidak memungkinkan.

#### KONDISI TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN MARTABAT

Kondisi semua perahu yang dideskripsikan para Rohingya, masuk dalam kategori tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Geladak bawah, yang mana para lelaki ditempatkan, sangatlah panas, tidak ada sirkulasi udara dan sangat sesak. Geladak atas, yang mana perempuan dan anak-anak cenderung ditempatkan, tidak ada perlindungan dari elemen luar. Kepenuhan yang parah dilaporkan semua orang; orang-orang tidak boleh berdiri, namun dipaksa duduk di posisi yang berdesakan dengan kaki disilang dan lutut diangkat (lihat foto terlampir).<sup>83</sup> Seorang perempuan berusia 25 tahun dari Maungdaw, Myanmar mengatakan kedua anak kecilnya harus duduk bersandar lutut sepanjang perjalanan yang berlangsung selama beberapa minggu.<sup>84</sup> Perahu-perahu tersebut sangat kotor, seorang yang lelaki yang membantu menyelamatkan perahu yang mendarat di Aceh pada 10 Mei mengatakan perahu itu sangat bau hingga penyelamat tidak bisa masuk, ia jelaskan: "Bau tersebut berasal dari orang-orang yang tidak bisa ke toilet atau mandi."<sup>85</sup> Seorang anak lelaki Rohingya berusia 15 tahun berkata tentang perahu itu: "Kami tidak bisa ke toilet ketika perlu."<sup>86</sup> Hanya ada dua toilet di perahu ini, yang membawa hampir 600 penumpang.<sup>87</sup>

Berdasarkan cerita hampir semua Rohingya yang diwawancarai di Aceh, makanan dan minuman yang disediakan di perahu yang berbeda-beda yang mereka gunakan sama sekali tidak memadai. Orang yang diwawancarai dari satu perahu secara konsisten mengatakan pada Amnesty International mereka diberikan makanan sekali sehari- terkadang dua kali- dan ini berisikan seporsi kecil nasi dan setengah gelas air. Seorang lelaki berusia 23 tahun berkata soal makanan: "Setelah tiga suap, semuanya habis."<sup>88</sup> Seorang perempuan berusia 19 tahun yang hamil tua di perahu (dan sejak saat itu telah melahirkan) mengatakan ia diberikan jumlah makanan dan minuman yang sama dengan penumpang lain, kecuali dalam dua kesempatan selama berbulan-bulan di laut, ketika ia menerima makanan sedikit lebih banyak dari penumpang lainnya.<sup>89</sup>

Staf dari rumah sakit di Kuala Cankoi yang merawat orang-orang yang tiba pada 10 Mei 2015 mengkonfirmasi banyak yang datang dengan kondisi kesehatan buruk. Seorang pekerja kesehatan mengatakan kepada Amnesty International para Rohingya dan Bangladesh menderita dehidrasi, kurang gizi, bronkhitis, dan flu. Banyak dari mereka kesulitan berjalan, hingga harus diangkat keluar perahu.<sup>90</sup> Seorang anak lelaki Rohingya berusia 15 tahun

---

<sup>83</sup> Wawancara di Aceh, 11 Agustus 2015, 12 Agustus 2015.

<sup>84</sup> Wawancara di Aceh, 12 Agustus 2015.

<sup>85</sup> Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>86</sup> Wawancara di Aceh, 15 Agustus 2015.

<sup>87</sup> Wawancara di Aceh, 12 Agustus 2015.

<sup>88</sup> Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>89</sup> Wawancara di Aceh, 12 Agustus 2015.

<sup>90</sup> Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015. Pekerja medis mengatakan bahwa kesulitan dalam berjalankaki disebabkan karena mereka tinggal di tempat sempit pada beberapa minggu atau bulan, tetapi menurut UNHCR ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang dihasilkan dalam kekurangan vitamin

mengatakan pada Amnesty International ketika perahunya merapat di Aceh, beberapa orang tidak sadarkan diri dan yang lainnya dehidrasi; ia berkata seorang dokter merawat mereka.<sup>91</sup> Organisasi masyarakat sipil lokal menunjukkan Amnesty International foto-foto Rohingya dan Bangladesh, yang diambil sesaat setelah mereka tiba, yang menunjukkan puluhan orang kekurusan, juga orang-orang yang menggunakan kantung cairan infus (*intravenous*).

## PERDAGANGAN MANUSIA VS. PENYELUNDUPAN

Persekusi dan kekerasan yang meluas, yang membuat Rohingya melarikan diri, sebagaimana dibahas di Bab 2, telah menciptakan pasar besar bagi penyelundup orang dan membuat Rohingya rentan bagi pedagang manusia.

Perdagangan manusia dan penyelundupan, keduanya adalah kejahatan transnasional, dilarang berdasarkan Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime / Transnational Crime Convention*), yang telah diratifikasi hampir semua negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand.<sup>92</sup> Perdagangan manusia dan penyelundupan diatur dalam dua protokol yang berbeda dalam Konvensi Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime Convention*), dan- walau terkadang sulit dibedakan dalam praktiknya- didefinisikan sebagai fenomena yang berbeda.<sup>93</sup>

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Protokol Perdagangan Manusia (*Trafficking Protocol*), “perdagangan manusia” berisikan:

- “(a) perekrutan, pengiriman, pemindahan, menyembunyikan atau menerima individu-individu;
- (b) dengan cara mengancam atau penggunaan paksaan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan terhadap orang lain;
- (c) Tujuan eksploitasi, mencakup pada paling minimum, eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau penghilangan organ.”<sup>94</sup>

Berdasarkan Protokol Perdagangan Manusia, pihak negara wajib memidanakan pedagang manusia dan membentuk tindakan komprehensif untuk mencegah dan memberantasnya, juga melindungi orang-orang dari menjadi korban lagi.<sup>95</sup> Protokol Perdagangan Manusia mensyaratkan negara “mempertimbangkan

B1

<sup>91</sup> Wawancara di Aceh, 15 Agustus 2015.

<sup>92</sup> *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, [Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional], G.A. Res. 25, annex I, U.N. GAOR, 55th Sess., Supp. No. 49, at 44, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001), berlaku sejak 29 September 2003.

<sup>93</sup> *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, [Protokol menentang penyelundupan Migran melalui darat, laut dan udara], G.A. Res. 55/25, annex III, U.N. GAOR, 55th Sess., Supp. No. 49, at 65, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001), berlaku sejak 28 Januari 2004 [*Protokol Penyelundupan*]; *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* [Protokol mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak], G.A. Res. 25, annex II, U.N. GAOR, 55th Sess., Supp. No. 49, at 60, U.N. Doc. A/55/49 (Vol. I) (2001), berlaku sejak 25 Desember 2003 [Protokol perdagangan manusia],

<sup>94</sup> UN Office on Drugs and Crime, *Legislative Guides for the Implementation of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocol Thereto* [Panduan Legislatif untuk mengimplementasikan Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional dan Protokol terkaitnya] 2004, hal. 268.

<sup>95</sup> *Protokol Perdagangan Manusia*, Pasal. 5, 9.

menerapkan langkah-langkah penyediaan pemulihan fisik, psikologis and sosial bagi para korban.”<sup>96</sup>

Penyelundupan manusia, di sisi lain, dipahami sebagai transaksi berdasarkan kesepakatan; Protokol Penyelundupan mendefinisikannya sebagai “mencari untuk mendapat, langsung ataupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal.”<sup>97</sup> Mereka yang lari dari konflik atau persekusi di berbagai belahan dunia sering menggunakan jasa penyelundup manusia untuk melintasi batas suatu negara secara tidak resmi, ketika mereka tidak bisa menemukan rute resmi untuk mencapai negara aman.<sup>98</sup> Para ahli mengakui bahwa “kebanyakan pencari suaka membutuhkan jasa penyelundup, di beberapa, jika tidak semua, tahapan perjalanan mereka.”<sup>99</sup> Protokol Penyelundupan Orang mewajibkan negara mencegah dan memerangi penyelundup manusia serta melindungi hak-hak orang yang diselundupkan.<sup>100</sup>

Penyelundupan itu sendiri bukanlah pelanggaran hak asasi manusia walaupun bisa melibatkan unsur kekerasan. Badan PBB tentang Obat-Obatan dan Kejahatan (UN Office on Drugs and Crime) mengakui perdagangan manusia dan penyelundupan bisa timpang tindih dan perbedaan antaranya terkadang tipis. Kriteria hukum kunci untuk membedakan antara penyelundupan dan perdagangan manusia adalah penyelundupan melibatkan kesepakatan walaupun berjalan di kondisi yang berbahaya dan merendahkan martabat, dan bukan untuk tujuan eksploitasi.<sup>101</sup>

Orang yang diperdagangkan atau diselundupkan bukanlah pelanggar hukum.

## PERDAGANGAN MANUSIA PARA ROHINGYA

Mereka yang diwawancarai oleh Amnesty International di Indonesia telah ditelantarkan oleh orang-orang yang mengangkut mereka. Karena perjalanan mereka tertangguhkan dalam perjalanan dari negara keberangkatan (Myanmar atau Bangladesh) ke negara tujuan mereka, tidaklah mungkin menyebut secara pasti bahwa mereka sedang diperdagangkan untuk kerja paksa atau untuk jenis eksploitasi lainnya. Namun, lima faktor yang dibahas di bagian berikutnya menunjukkan bahwa banyak - jika tidak sebagian besar - dari orang-orang Rohingya yang tiba di Aceh pada Mei 2015 adalah korban perdagangan manusia. Seperti yang akan dibahas di bawah ini, Amnesty International juga memiliki kekhawatiran bahwa mungkin ada korban perdagangan manusia diantara penumpang Bangladesh.

---

<sup>96</sup> *Protokol Perdagangan Manusia*, Pasal. 6(3).

<sup>97</sup> Protokol Penyelundupan, Pasal. 3.

<sup>98</sup> Dalam konteks krisis pengungsi Mediterania, misalnya, Amnesty International menganggap sebagian besar orang yang menggunakan perahu mencapai Eropa adalah diselundupkan. Lihat Amnesty International, *Libya is Full of Cruelty: Stories of Abduction, Sexual Violence and Abuse from Migrants and Refugees* [Libya penuh dengan kekejaman: Kisah penculikan, kekerasan seksual dan penganiayaan dari migran dan pengungsi], MDE 19/1578/2015, 2015, tersedia di <https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/1578/2015/en/>, hal. 12.

<sup>99</sup> Sharon Pickering, “Transnational Crime and Refugee Protection,” [Kejahatan Transnasional dan Perlindungan Pengungsi], *Social Justice* Vol. 34, No. 2 (2007) tersedia di [http://www.socialjusticejournal.org/archive/108\\_34\\_2/108\\_05Pickering.pdf](http://www.socialjusticejournal.org/archive/108_34_2/108_05Pickering.pdf), hal. 53.

<sup>100</sup> *Protokol Penyelundupan*, Pasal. 2.

<sup>101</sup> UN Office on Drugs and Crime, “Migrant Smuggling FAQs” [Tanya jawab soal penyelundupan migran], tersedia di [https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs-migrant-smuggling.html#Overlaps\\_and\\_differences](https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs-migrant-smuggling.html#Overlaps_and_differences).

## KEDEKATAN DAN PREVALENSI JARINGAN PERDAGANGAN MANUSIA

Pertama, kedekatan dan prevalensi jaringan perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara ini menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka yang mengambil orang-orang Rohingya dari perahu, memperdagangkannya ke dalam eksploitasi buruh di darat atau di laut.

Selama beberapa tahun, industri perikanan Thailand telah terlibat dalam eksploitasi dan penyalahgunaan yang meluas, termasuk kerja paksa dan perdagangan manusia.<sup>102</sup> Pekerja yang menjadi korban perdagangan dalam industri ini didominasi laki-laki dari Myanmar dan Kamboja.<sup>103</sup> *Labour Rights Promotion Network* memperkirakan bahwa 80% hingga 90% warga Myanmar yang bekerja di sektor pengolahan hasil laut di provinsi Samut Sakhon, Thailand, berada dalam jeratan hutang yang eksploitatif.<sup>104</sup> Selama beberapa tahun terakhir, wartawan investigasi telah menemukan bukti bahwa lelaki Rohingya dijual oleh pelaku perdagangan manusia ke kapal nelayan Thailand untuk kerja paksa, terutama jika keluarga mereka tidak mampu membayar tebusan yang dituntut oleh pelaku perdagangan manusia.<sup>105</sup> Wartawan menemukan keterlibatan pejabat Thailand yang diduga memfasilitasi atau menutup mata akan perdagangan manusia ini demi imbalan pembayaran.<sup>106</sup> Banyaknya kuburan orang-orang Rohingya dan Bangladesh yang ditemukan di kamp-kamp perdagangan manusia dekat perbatasan Thailand-Malaysia pada bulan Mei 2015 memberikan bukti lebih lanjut akan skala jaringan perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara ini.<sup>107</sup>

Kesaksian dari orang-orang Rohingya di Aceh menunjukkan bahwa banyak dari mereka

---

<sup>102</sup> International Labour Organization, *Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*, 2013 [Praktik kerja dan kondisi kerja di sektor perikanan Thailand], tersedia di [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_220596.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_220596.pdf), hal. ix.

<sup>103</sup> International Labour Organization, *Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector*, 2013 [Praktik kerja dan kondisi kerja di sektor perikanan Thailand], tersedia di [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_220596.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_220596.pdf), hal. 30.

<sup>104</sup> Cited in International Labour Organization, *Employment Practices and Working Conditions in Thailand's Fishing Sector* [Praktik kerja dan kondisi kerja di sektor perikanan Thailand], 2013, tersedia di [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms\\_220596.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_220596.pdf), hal. 29.

<sup>105</sup> Jason Szep and Stuart Grudgings, "Special Report: Thai Authorities Implicated in Rohingya Muslim Smuggling Network" [Laporan Khusus: Pihak berwenang Thailand terlibat dalam jaringan penyelundupan Rohingya Muslim], Reuters, 17 Juli 2013, tersedia di <http://www.reuters.com/article/2013/07/17/us-myanmar-exodus-specialreport-idUSBRE96G02520130717>; Jason Szep and Andrew R.C. Marshall, "Special Report – Thailand Secretly Dumps Myanmar Refugees into Trafficking Rings" [Laporan Khusus: Thailand secara diam-diam membuang pengungsi Myanmar ke jaringan perdagangan manusia], 5 Desember 2013, tersedia di <http://uk.reuters.com/article/2013/12/05/uk-thailand-rohingya-special-report-idUKBRE9B400920131205>; Emanuel Stoakes, Chris Kelly, Annie Kelly, "Sold from a Jungle Camp to Thailand's Fishing Industry: 'I Saw 13 People Die'" [Dijual dari Kamp Hutan ke industri perikanan Thailand: 'saya lihat 13 orang meninggal'], *The Guardian*, 20 Juli 2015, tersedia di [www.theguardian.com/global-development/2015/jul/20/sold-from-jungle-camp-thailand-fishing-industry-trafficking](http://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/20/sold-from-jungle-camp-thailand-fishing-industry-trafficking).

<sup>106</sup> Jason Szep and Stuart Grudgings, "Special Report: Thai Authorities Implicated in Rohingya Muslim Smuggling Network" [Laporan Khusus: Pihak berwenang Thailand terlibat dalam jaringan penyelundupan Rohingya Muslim] Reuters, 17 Juli 2013, tersedia di <http://www.reuters.com/article/2013/07/17/us-myanmar-exodus-specialreport-idUSBRE96G02520130717>.

<sup>107</sup> Emanuel Stoakes, "Thailand Human Trafficking Death Toll Far Greater than Feared, Claims Rights Group," [Jumlah kematian di perdagangan manusia Thailand dikhawatirkan jauh lebih besar, ungkap kelompok HAM] *The Guardian*, 6 Mei 2015, tersedia di <http://www.theguardian.com/global-development/2015/Mei/06/thailand-human-trafficking-mass-grave-burma-rohingya-people>.

menghabiskan waktu yang lama di perairan Malaysia atau perairan Thailand di dekat kamp kerja paksa di mana kuburan massal ditemukan pada Mei 2015. Beberapa narasumber mengatakan bahwa mereka melakukan beberapa kali perjalanan ke dan dari pulau, yang oleh beberapa orang diidentifikasi sebagai Langkawi. Langkawi adalah nama pulau terbesar di kepulauan Malaysia di negara bagian Kedah, tidak jauh dari perbatasan daratan antara Malaysia dan Thailand di mana kuburan massal korban *trafficking* ditemukan pada Mei 2015. Seorang lelaki Rohingya yang dapat berbicara bahasa Burma, menanyakan nama pulau tersebut pada kapten perahu, dan si kapten mengatakan bahwa pulau itu bernama Langkawi. Lelaki itu mengatakan kepada Amnesty International: "Kami menghabiskan tujuh hari di Langkawi – pulau itu milik Malaysia, dan dekat dengan Thailand. Kapten kapal mengatakan kepada saya bahwa kita tidak bisa pergi ke Malaysia dan Thailand karena pemerintah Malaysia dan Thailand saling berdebat satu sama lain."<sup>108</sup> Menurut lelaki tersebut, hal ini terjadi pada April atau Mei 2015. Serupa dengan yang dikatakan lelaki tersebut, seorang anak berusia 16 tahun di perahu yang sama mengatakan bahwa kapten perahu berkata kepada penumpang: "Kita tidak bisa pergi ke perbatasan Thailand - [Malaysia]. Ada banyak masalah disana. Kita sedang dalam masalah."<sup>109</sup> Pernyataan awak perahu ini merujuk pada tindakan keras regional terhadap perdagangan manusia yang dimulai sekitar 9 Mei (seperti yang dijelaskan dalam teks dalam kotak di atas).

Sekelompok perempuan juga mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka ditempatkan dalam perahu yang berlabuh di Langkawi dalam periode waktu yang sama, meskipun tidak jelas apakah ini adalah perahu yang sama atau perahu yang berbeda dari orang-orang yang diwawancarai lainnya. Perempuan-perempuan ini mengatakan bahwa mereka melihat sekitar 50 perahu lain dengan ukuran yang sama seperti perahu mereka (masing-masing berisi beberapa ratus orang), serta sebuah perahu yang sangat besar, tingginya beberapa tingkat, semuanya berada di dekat pulau. Pada akhirnya, mereka mengatakan, semua perahu meninggalkan Langkawi pada awal Mei kecuali perahu besar itu, yang mereka percayai berdiam di dekat pulau.<sup>110</sup>

Laporan-laporan media sejak Juni 2015 tampaknya membenarkan pernyataan narasumber di Aceh yang mengatakan pada Amnesty International tentang sebuah kapal yang sangat besar yang tinggal di Langkawi setelah semua perahu lainnya pergi. Seorang pejabat polisi Malaysia mengatakan kepada media bahwa perahu yang berisi 1.158 Bangladesh dan Rohingya telah mendarat di Langkawi pada 10 Mei.<sup>111</sup> Ini satu hari setelah tanggal yang dikatakan beberapa narasumber Rohingya pada Amnesty International bahwa mereka telah melewati perahu yang sangat besar dekat Langkawi.

#### EKSPLOITASI

Sebuah tujuan eksploitatif adalah indikator kedua dari perdagangan manusia. *Trafficking Protocol* (Protokol Perdagangan Manusia) tidak memberikan daftar lengkap dari semua tujuan eksploitatif, melainkan daftar terbuka, merinci apa yang negara harus, minimal, perlakukan

---

<sup>108</sup> Wawancara di Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>109</sup> Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>110</sup> Wawancara di Aceh, 16 Agustus 2015.

<sup>111</sup> The Malaysian Insider, "Boat Used to Smuggle Rohingya to Langkawi Owned by Local Man, Say Police" [Perahu yang digunakan untuk menyelundupkan Rohingya ke Langkawi dimiliki orang lokal, ujar polisi], 25 Juni 2015, tersedia di <http://www.themalaysianinsider.com/malaysia/article/boat-used-to-smuggle-rohingya-to-langkawi-owned-by-local-man-say-police>.

sebagai eksploitasi.<sup>112</sup> Pemukulan atau ancaman kematian untuk mendapatkan uang tebusan bisa dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Fakta bahwa penumpang dipukuli atau dibunuh untuk tebusan menunjukkan bahwa tujuan mengambil orang dari perahu itu tidak untuk memfasilitasi masuk secara tidak resmi ke suatu negara dengan imbalan pembayaran, tapi untuk mengambil uang tebusan. Kesimpulan bahwa keuntungan finansial untuk awak perahu tidak dari pengadaan masuk secara tidak resmi tetapi dari eksploitasi kerentanan penumpang juga didukung oleh bukti-bukti (yang dikumpulkan oleh pemerintah, badan-badan PBB dan wartawan) dari awak perahu yang menjual beberapa orang, termasuk orang yang tidak mampu membayar uang tebusan, untuk kerja paksa. Selain itu, pemukulan yang hampir dilakukan secara rutin, yang disebut oleh narasumber dilakukan oleh awak perahu, menunjukkan bahwa awak perahu mungkin telah mempersiapkan orang untuk diperdagangkan dalam kerja paksa.

#### PERJALANAN BERBIAYA RENDAH ATAU GRATIS

Sebuah indikasi ketiga bahwa orang-orang Rohingya sedang diperdagangkan adalah rendahnya biaya perjalanan. Meskipun beberapa orang mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka membayar mulai dari 150.000 Myanmar Kyat (116 USD)<sup>113</sup> untuk seorang ibu dan anak hingga 7.000 Ringgit Malaysia (1.650 USD)<sup>114</sup> untuk satu orang penumpang, perjalanan beberapa orang lainnya bebas biaya. Beberapa orang Rohingya tidak membayar dimuka, dengan pengertian bahwa mereka akan membayar di Malaysia, sedangkan orang Rohingya lainnya tak membayar sedikitpun, dan diberitahu bahwa perjalanannya gratis. Perjalanan berbiaya rendah atau gratis ini menunjukkan bahwa awak perahu akan menutup biaya transportasi (termasuk perahu, peralatan, bahan bakar, dan ransum), dan membuat keuntungan dengan cara lain, kemungkinan dengan memperdagangkan orang untuk kerja paksa atau dengan memukul penumpang sampai keluarga mereka membayar uang untuk membebaskan mereka.

Wawancara UNHCR dengan beberapa ratus penumpang menguatkan kesaksian ini: "biaya awal perjalanan seringkali rendah dan dalam beberapa kasus, beberapa orang digratiskan dengan syarat bahwa mereka membayar utang dengan gaji bekerja di masa datang di Malaysia. Mungkin ada beberapa janji-janji kerja palsu dan bahkan penawaran insentif tunai dalam jumlah kecil. Mereka yang berubah pikiran dan meminta turun dari perahu dipaksa untuk tetap naik. Kami mendengar bahwa ada anak-anak yang diculik dari jalanan atau saat memancing, dan dipaksa naik ke perahu. Orang tidak menyadari bahwa mereka nanti akan diperas di tengah perjalanan dan apa yang dimulai dengan penyelundupan akan segera berubah menjadi perdagangan manusia."<sup>115</sup>

#### PENCULIKAN

Diculik secara paksa adalah indikator keempat perdagangan manusia. Organisasi-organisasi

---

<sup>112</sup> Pasal 3(a) menyatakan: "...eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau penghilangan organ."

<sup>113</sup> Wawancara di Aceh, 12 Agustus 2015.

<sup>114</sup> Wawancara di Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>115</sup> UNHCR, "Some 25,000 Risk Sea Crossings in Bay of Bengal over First Quarter, Almost Double from Year Earlier" [Sekitar 25,000 mengambil risiko menyeberangi laut di Teluk Bengal dalam kuartal pertama, hampir dua kali lipat tahun sebelumnya], 8 Mei 2015, tersedia di <http://www.unhcr.org/554c9fae9.html>.

HAM telah mendokumentasikan beberapa kasus penculikan di antara orang-orang Rohingya yang terdampar di laut pada bulan Mei 2015.<sup>116</sup> Di Aceh, Amnesty International mendengar ada tiga kasus dugaan penculikan - satu orang Rohingya dan dua orang Bangladesh. Seorang anak Rohingya berusia 17 tahun yang tinggal di dekat bandara Sittwe di Myanmar mengatakan kepada Amnesty International bahwa ia sedang dalam perjalanan mengunjungi kerabat di kamp pengungsi internal (IDP) Sittwe ketika lima lelaki membawanya dengan paksa ke kebun kelapa terpencil. Mereka memukulinya ketika ia mencoba melarikan diri dan memaksanya naik ke sebuah perahu kecil, yang membawanya ke sebuah perahu besar di mana ia ditahan untuk tebusan. Dia diculik sekitar awal Maret 2015, dan tiba di Indonesia pada bulan Mei.<sup>117</sup> Serupa dengan yang akan dibahas di bawah, dua migran Bangladesh mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka diculik dari Teknaf.<sup>118</sup>

#### AWAK PERAHU YANG TERORGANISIR DENGAN BAIK

Faktor kelima yang menunjukkan bahwa orang-orang Rohingya menjadi korban jaringan perdagangan manusia, adalah awak perahu yang terorganisir dengan baik. Kesaksian yang dikumpulkan oleh Amnesty International menunjukkan bahwa perahu yang berisi orang-orang Rohingya dijalankan oleh awak yang terorganisir dengan baik, didanai dan dilengkapi dengan perangkat komunikasi dan peralatan navigasi yang baik.

Kemampuan awak perahu untuk menghindari kapal angkatan laut sangat mengejutkan. Seorang lelaki berusia 20 tahun dari Nagir Para mengatakan bahwa kapal angkatan laut berada cukup dekat dengannya hingga ia bisa melihat bahwa kapal itu mengibarkan bendera Thailand, namun perahu yang ditumpanginya itu bisa lolos dari penangkapan.<sup>119</sup> Demikian pula, seorang lelaki berusia 48 tahun mengatakan bahwa pada beberapa titik, perahu berada dekat dengan tiga kapal angkatan laut yang berbeda; ia secara akurat menggambarkan mereka sebagai kapal besar, berwarna abu-abu, terbuat dari logam, dan memiliki peralatan satelit. Lelaki ini mengenali bendera kapal angkatan laut tersebut –bendera Thailand dan Indonesia. Dia tidak melihat kapal angkatan laut Malaysia, tapi pada satu titik kapalnya berubah arah selama 15 hari dan awak perahu mengatakan kepadanya bahwa mereka menghindari penangkapan oleh angkatan laut Malaysia.<sup>120</sup> Banyak narasumber lain mengatakan kepada Amnesty International bahwa awak perahu mereka sering melakukan tindakan mengelak, termasuk mengubah arah dan menuju ke laut selama berminggu-minggu, melakukan beberapa perjalanan ke dan dari sebuah pulau dekat perbatasan Thailand dan Malaysia (kemungkinan pulau Langkawi), serta memaksa semua penumpang pergi ke bawah geladak ketika ada kapal angkatan laut di dekatnya.

Ada kemungkinan bahwa kemampuan awak perahu untuk menghindari deteksi pemerintah, terkait dengan korupsi, sepengetahuan atau keterlibatan oleh pihak berwenang. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada Mei 2015, beberapa pejabat Thailand dan Malaysia telah

---

<sup>116</sup> Human Rights Watch, *Southeast Asia: Accounts from Rohingya Boat People* [Asia Tenggara: kesaksian dari manusia perahu Rohingya], 27 Mei 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/556868b94.html>.

<sup>117</sup> Wawancara di Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>118</sup> Wawancara di Aceh, 15 Agustus 2015.

<sup>119</sup> Wawancara di Aceh, 11 Agustus 2015.

<sup>120</sup> Wawancara di Aceh, 14 Agustus 2015.

ditangkap atau dihukum atas dugaan keterlibatan mereka dalam perdagangan manusia.<sup>121</sup>

Bukti lebih lanjut bahwa para awak perahu ini terorganisir dengan baik adalah deskripsi narasumber tentang penelantaran perahu secara cepat di laut.

Puluhan orang Rohingya yang berada dalam satu perahu yang sama memberikan kesaksian konsisten tentang bagaimana awak perahu meninggalkan perahu mereka di suatu tempat di perairan antara Malaysia dan Indonesia, hanya dua hari setelah Thailand mengumumkan tindakan keras terhadap pelaku perdagangan manusia.<sup>122</sup> Selama satu hari pada 9 Mei 2015, beberapa kapal motor cepat (*speedboats*) datang ke perahu, dan laki-laki dengan senjata - mengenakan pakaian sipil- naik ke perahu. Beberapa orang yang diwawancarai mengatakan bahwa orang-orang itu berteriak dalam bahasa Thailand dan menembakkan senjata mereka ke udara. Para lelaki tersebut melepas semua peralatan perahu, termasuk lampu, tali, jangkar, peralatan navigasi, dan memberikan jatah ransum terakhir penumpang. Orang-orang itu kemudian meninggalkan perahu dengan *speedboats*. Setelah matahari telah terbenam, *speedboats* itu kembali dan pergi dengan awak perahu. Kepergian awak perahu menimbulkan kepanikan di antara penumpang. Sebelum pergi, menurut beberapa narasumber, awak perahu mengikat kemudi dan mengarahkan perahu ke Indonesia. Pada pagi hari 10 Mei, perahu terdampar sekitar 100 meter dari pantai, dekat desa Kuala Cankoi di Aceh Utara.

## PERDAGANGAN MANUSIA WARGA BANGLADESH

Dari 1.800 orang yang mendarat di Aceh pada Mei 2015, diperkirakan hampir setengahnya - sekitar 800 orang - adalah warga Bangladesh,<sup>123</sup> dan berada dalam perahu yang sama dengan orang-orang Rohingya. Warga Bangladesh telah diberi kesempatan untuk mendaftar ke UNHCR untuk perlindungan internasional, tetapi mereka tidak berminat melakukannya. Pada akhir Agustus 2015, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mengatakan kepada Amnesty International bahwa lebih dari 600 warga Bangladesh telah dipulangkan, dan sisanya sebanyak 200 orang atau lebih akan dipulangkan pada akhir 2015.<sup>124</sup>

Warga Bangladesh di Aceh ditempatkan terpisah dari Rohingya, dan meskipun Amnesty International mengalami kesulitan mendapatkan akses penuh kepada mereka, Amnesty International berhasil mengumpulkan tujuh<sup>125</sup> kesaksian dari 56 orang yang tersisa di lokasi (sekitar 280 orang lain sudah dipulangkan).

Mereka yang diwawancarai mengatakan pada Amnesty International tentang penyiksaan yang

---

<sup>121</sup> ABC News, "Malaysia Detains 12 Police Officials in Thai Border People-Smuggling Camps Probe" [Malaysia menahan 12 polisi di perbatasan Thailand dalam penyelidikan penyelundupan manusia di perbatasan Thailand], 27 Mei 2015, tersedia di <http://www.abc.net.au/news/2015-05-27/malaysia-detains-12-police-in-people-smuggling-camps-probe/6502596>; Al Jazeera America, "Thai Police Arrest Man Suspected of Running Deadly Jungle Camp" [Polisi Thailand menahan orang yang diduga mengelola kamp hutan mematikan], 4 Mei 2015, tersedia di <http://america.aljazeera.com/articles/2015/5/4/thai-police-arrest-rohingya-man-suspected-of-running-deadly-jungle-camp.html>

<sup>122</sup> The Nation, "Ten-Day Deadline to Find Migrant Camps" [Batas waktu 10 hari untuk menemukan kamp migran], 7 Mei 2015, tersedia di <http://www.nationmultimedia.com/national/Ten-day-deadline-to-find-migrant-camps-30259476.html>.

<sup>123</sup> UNHCR Indonesia, *Monthly Statistical Report: July 2015* [Laporan Statistik Bulanan: Juli 2015], hal. 3.

<sup>124</sup> Wawancara di Jakarta, 24 Agustus 2015.

<sup>125</sup> Kecuali disebutkan lain, bagian ini bersumber dari wawancara di Aceh, 15 Agustus 2015.

mereka alami dalam perjalanan menuju Indonesia.

Dua dari tujuh orang yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka diculik dari Bangladesh. Seorang lelaki berusia 32 tahun mengatakan bahwa dia bersama tiga temannya sedang berjalan di jalan-jalan Teknaf, ketika sekitar 15 orang dengan revolver dan pisau panjang memaksanya masuk ke dalam rumah dan kemudian, memaksa naik ke perahu. Seorang lelaki berusia 35 tahun menceritakan kisah yang sama: dia berada di sebuah pasar di Teknaf ketika dua orang dengan senjata dan lima orang lain dengan pisau panjang menculiknya, membawanya ke sebuah rumah, dan kemudian membawanya ke perahu yang besar.

Seorang lelaki Bangladesh lainnya, berusia 21 tahun dari Dhaka, mengatakan dia dipukuli dengan kejam di perahu besar demi tebusan. Dia sedang berjalan di pantai saat dia didekati oleh seorang lelaki yang menawarkan untuk membawanya ke Malaysia. Setelah berdiskusi dengan orang tuanya, dia setuju untuk membayar 230.000 Taka Bangladesh (sekitar 2.500 USD) setelah dia mencapai Malaysia. Dia melakukan perjalanan ke Cox Bazaar, dan tinggal di sebuah rumah yang dikelola oleh empat *dalal* (agen). Dia dibawa ke sebuah perahu kecil, di mana ia menunggu dengan 21 orang lainnya selama empat hari, dan kemudian dibawa ke sebuah perahu yang lebih besar dekat Myanmar, yang pergi ke arah ke pantai Thailand. Dia mengatakan bahwa perahunya berdiam dekat Thailand selama tujuh bulan.

Selama kurun waktu tersebut, dia berkata: "Beberapa *dalal* mulai memukuli penumpang untuk memaksa mereka membayar. Mereka memukuli penumpang dua kali sehari, pada pagi dan sore hari." Dia mengatakan kepada Amnesty International bahwa orang yang keluarganya membayar tebusan diambil oleh speedboat dan dibawa ke Malaysia, meskipun tidak jelas apa yang terjadi pada mereka setelah mereka mendarat.

Dia diperintahkan untuk menelpon orang tuanya; dalal mengatakan kepada orang tuanya untuk segera mentransfer sejumlah uang, kalau tidak, dia akan dipukuli setiap hari. Dia mengatakan kepada Amnesty International: "Saya tidak tahan dipukuli. Saya coba melompat dari kapal satu kali - saya pikir lebih baik melompat dan dimakan oleh ikan kemudian mati, daripada menderita karena dipukul setiap hari. Dalal mencoba menembak saya, tapi mereka tidak berhasil." Setelah dia dibawa kembali ke perahu, dia digantung terbalik dengan tangan terikat di belakang punggungnya, dan dipukuli selama satu jam. Lelaki itu menunjukkan bekas luka di punggung (lihat foto terlampir) dan perutnya pada Amnesty International.

Pada akhirnya, dia dipindahkan ke perahu besar lain yang berisi sekitar 1.100 penumpang, yang dimaksudkan untuk mendarat di Malaysia, tapi setelah 21 hari kapal kembali ke pantai Thailand. Para awak kemudian meninggalkan perahu, yang akhirnya terdampar di Indonesia pada Mei 2015.

Berdasarkan kesaksian-kesaksian ini, serta bukti-bukti yang diberikan oleh orang-orang Rohingya yang berada di perahu yang sama, yang terdampar di Indonesia, Amnesty International khawatir bahwa beberapa penumpang Bangladesh juga adalah korban perdagangan manusia.

## DIDORONG KEMBALI KE LAUT

Antara 9 Mei -ketika *Arakan Project* melaporkan bahwa penyelundup telah menelantarkan beberapa perahu, meninggalkan ribuan orang terdampar di laut - dan 20 Mei 2015 - ketika

pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menawarkan penampungan sementara hingga 7.000 orang- wartawan, badan-badan PBB dan organisasi HAM menyoroti bahwa pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Thailand terlibat dalam "ping-pong maritim" kehidupan manusia, mendorong kembali perahu dari pantai mereka.<sup>126</sup> Kewajiban *non-refoulement* yang mengikat, yang telah dibahas sebelumnya dalam laporan ini, melarang negara melakukan tindakan "dorong kembali (*push-backs*)," karena tindakan ini memiliki resiko inheren yakni orang-orang dalam perahu tersebut dikirim ke suatu tempat di mana mereka mungkin akan mendapat pelanggaran HAM serius.

Pada 10 Mei 2015, sebuah perahu kandas di Aceh Utara, dan 578 orang diselamatkan oleh nelayan setempat. Pada 11 Mei, dua kapal tiba di Langkawi, Malaysia. Namun, dari 11 Mei dan seterusnya, laporan berita mengindikasikan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Thailand menarik perahu keluar dari perairan mereka atau mengusir mereka. Sebagai contoh, pada 15 Mei, wartawan melaporkan bahwa perahu sebuah berwarna hijau ditarik dari perairan Thailand oleh otoritas Thailand hanya untuk dicegat oleh otoritas Malaysia, yang kemudian menarik perahu itu ke Indonesia.<sup>127</sup> Angkatan Laut Indonesia juga dituduh menarik perahu yang berisi sekitar 400 Rohingya kembali ke laut, di lepas pantai Aceh.<sup>128</sup>

Seorang Rohingya di Aceh mengatakan kepada Amnesty International bahwa perahunya telah diusir oleh sebuah kapal pemerintah. Seorang anak lelaki berusia 17 tahun mengatakan bahwa pada Mei 2015 perahu itu dicegat oleh Angkatan Laut Indonesia, yang memberi mereka makanan dan menarik mereka menuju Malaysia, tapi mereka kemudian perahu mereka ditangkap oleh angkatan laut Malaysia, yang menarik mereka kembali ke Indonesia.<sup>129</sup> Anak ini kemungkinan menumpang perahu yang membawa 800-900 penumpang yang dilaporkan UNHCR sebagai mengikuti lintasan identik: intersepsi oleh Indonesia, penyediaan makanan dan air, penarikan perahu menuju Malaysia, dan kemudian pengusiran oleh pemerintah Malaysia.<sup>130</sup> Perahu ini akhirnya terdampar di Aceh pada 15 Mei 2015, di mana nelayan setempat menyelamatkan 820 penumpangnya.<sup>131</sup>

## PENCARIAN DAN PENYELEMATAN YANG TIDAK MEMADAI

Informasi yang tersedia tentang operasi pencarian dan penyelamatan yang berlangsung di Teluk Bengal dan Laut Andaman pada Mei dan Juni 2015 menunjukkan bahwa operasi ini tidak memadai, meskipun kelangkaan informasi yang tersedia secara umum membuat

---

<sup>126</sup> Aubrey Belford dan Reza Munawir, "Migrants in 'Maritime Ping-Pong' as Asian Nations Turn Them Back" [Migran di 'ping-pong maritim' ketika negara-negara asia mendorong mereka kembali], Reuters, 16 Mei 2015, tersedia di [www.reuters.com/article/2015/05/16/us-asia-migrants-idUSKBN00105H20150516](http://www.reuters.com/article/2015/05/16/us-asia-migrants-idUSKBN00105H20150516).

<sup>127</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran di Laut]*, Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, p. 4.

<sup>128</sup> Amnesty International, "South East Asia: Immediately Step up Efforts to Rescue Thousands at Grave Risk at Sea" [Asia Tenggara: Secepatnya meningkatkan upaya untuk menyelamatkan ribuan orang dengan risiko besar di lautan], 13 Mei 2015, tersedia di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/south-east-asia-immediately-step-up-efforts-to-rescue-thousands-at-grave-risk-at-sea/>.

<sup>129</sup> Wawancara di Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>130</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran di Laut]*, Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 3.

<sup>131</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran di Laut]*, Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 4.

penilaian menyeluruh dan independen berjalan sulit. UNHCR melaporkan bahwa angkatan laut Bangladesh dan Myanmar menyelamatkan ratusan penumpang pada tanggal 12, 21, dan 29 Mei. Amerika Serikat (AS) melakukan misi bersama pengintaian udara di atas Laut Andaman dengan Malaysia (antara 25 Mei dan 13 Juni) dan Thailand (antara 30 Mei dan 11 Juni). Negara-negara lain memberikan bantuan; misalnya sebuah kapal Turki bergabung dalam upaya pencarian dan penyelamatan,<sup>132</sup> Namun, UNHCR tidak mencatat adanya penyelamatan apapun di laut oleh pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand.<sup>133</sup>

Orang-orang Rohingya yang berbicara dengan Amnesty International tidak diselamatkan oleh kapal pemerintah, melainkan oleh nelayan Aceh. Banyak diantara mereka yang diwawancarai menumpang sebuah perahu yang mengangkut 578 orang Rohingya dan Bangladesh (difoto oleh perwakilan nelayan pada bulan Agustus 2015, lihat foto terlampir), yang terdampar di Aceh pada 10 Mei.<sup>134</sup>

Mengingat bahwa hanya ada total lima pendaratan perahu yang dikonfirmasi di Indonesia dan Malaysia pada Mei 2015, Amnesty International khawatir bahwa lebih banyak nyawa yang hilang di laut pada tahun 2015 dari perkiraan UNHCR yakni 370 orang.<sup>135</sup> Orang Rohingya yang berbicara dengan Amnesty International mengatakan bahwa mereka melihat banyak perahu lain yang penuh dengan migran dan pencari suaka. Seorang lelaki berusia 25 tahun dari Sittwe bersaksi melihat 30 perahu yang bersimpang jalan dengan kapalnya dalam dua hari terakhir dari perjalanan bulan Mei.<sup>136</sup> Seorang anak berusia 16 tahun dari Maungdaw mengatakan bahwa ia berada di sebuah perahu yang melakukan perjalanan bersama-sama dengan 11 perahu lain, dan bahwa ia juga melihat perahu-perahu lainnya, kadang-kadang dua perahu per hari.<sup>137</sup> Seorang anak berusia 15 tahun mengatakan kepada Amnesty International bahwa perahunya berjalan bersama dengan delapan perahu lain, yang semuanya sangat penuh sesak.<sup>138</sup>

## KESIMPULAN

Mengingat bukti rinci dalam bab ini, ada kemungkinan bahwa banyak -jika tidak sebagian besar- dari orang-orang Rohingya yang terdampar di Aceh pada Mei 2015 adalah korban perdagangan manusia.

Pemerintah Asia Tenggara harus bekerja sama untuk menyusun langkah-langkah efektif untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi orang-orang dari pelanggaran HAM oleh para pedagang dan penyelundup manusia. Hal ini memerlukan, antara lain, bahwa

---

<sup>132</sup> Hurriyet Daily News, "Turkish Military Ship Joins Efforts to Reach Rohingya Muslims" [Kapal Militer Turki bergabung dalam upaya menemukan Rohingya muslim], 19 Mei 2015, tersedia di [http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-military-ship-joins-efforts-to-reach-rohingya-muslims.aspx?PageID=238&NID=82639&NewsCatID=510&sm\\_au=iVVqDWZr7wV0skOQ](http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-military-ship-joins-efforts-to-reach-rohingya-muslims.aspx?PageID=238&NID=82639&NewsCatID=510&sm_au=iVVqDWZr7wV0skOQ).

<sup>133</sup> Kecuali disebutkan lain, paragraf ini bersumber dari UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran di Laut]*, Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 3-6.

<sup>134</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran di Laut]*, Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 3.

<sup>135</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran di Laut]*, Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 1, 6.

<sup>136</sup> Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>137</sup> Wawancara di Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>138</sup> Wawancara di Aceh, 15 Agustus 2015.

pemerintah terus memantau dan mencari perahu dan kamp-kamp di mana manusia kemungkinan diperdagangkan, dijadikan tebusan dan mengalami pelanggaran HAM serius. Negara-negara Asia Tenggara juga harus membantu pemulihan fisik dan psikososial orang-orang Rohingya dan Bangladesh yang menjadi korban perdagangan manusia.<sup>139</sup>

Sementara negara-negara Asia Tenggara harus menyelidiki dan mengadili mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia di pengadilan yang adil, negara-negara ini juga harus memastikan bahwa inisiatif terhadap para pelaku perdagangan manusia tidak membahayakan kehidupan orang-orang di laut, dan tidak membuat orang-orang terjebak di Myanmar dan Bangladesh tanpa jalan keluar. Ini sangat penting, mengingat bukti dari Mei 2015 bahwa pelaku perdagangan manusia menelantarkan penumpang mereka di laut segera setelah langkah-langkah penegakan hukum diumumkan. Untuk memastikan bahwa tindakan terhadap pelaku perdagangan manusia tidak membuat orang terpapar bahaya lebih besar, diperlukan koordinasi antar pemerintah negara untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diterapkan di suatu tempat tidak menyebabkan orang-orang terpapar risiko di tempat lain. Memang semua negara di Asia Tenggara secara hukum wajib memastikan bahwa tindakan terhadap perdagangan manusia tidak secara sengaja atau tidak sengaja melanggar HAM yang telah ditetapkan.<sup>140</sup>

Dalam hal ini, komponen penting dari respon anti perdagangan manusia yang efektif di Asia Tenggara adalah operasi pencarian dan penyelamatan yang terkoordinasi, dikombinasikan dengan mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi tempat disembarkasi aman secara cepat. Pencarian dan penyelamatan tidak hanya penting bagi kemanusiaan; ia juga merupakan kewajiban hukum internasional di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, yang Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara pihak.<sup>141</sup> Agar efektif, penyelamatan harus diikuti dengan prosedur pendaratan yang aman dan dapat diprediksi.<sup>142</sup> Mengingat tidak adanya data yang tepat akan jumlah korban jiwa selama krisis Mei 2015, negara-negara di kawasan tersebut juga harus membentuk mekanisme akuntabilitas untuk mendukung dan meneliti kepatuhan akan kewajiban pencarian dan penyelamatan, serta metode pelacakan dan pengidentifikasian orang-orang yang mati atau hilang di laut.

---

<sup>139</sup> *Protokol Perdagangan Manusia*, Pasal. 6, 9.

<sup>140</sup> Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* [Hukum Internasional Perdagangan Manusia], Cambridge University Press, 2010, hal. 455-456.

<sup>141</sup> *UN Convention on the Law of the Sea* [Konvensi Hukum Laut PBB], UN Doc. A/CONF.62/122, Pasal. 98(2): "Setiap negara pantai harus mempromosikan pembentukan, pengoperasian dan pemeliharaan jasa pencarian dan penyelamatan yang memadai dan efektif terkait keselamatan di laut dan di atas laut, ketika situasi membutuhkan, dengan cara pengaturan kerja sama regional yang saling menguntungkan dengan negara tetangga untuk tujuan tersebut."

<sup>142</sup> UNHCR, *The Treatment of Persons Rescued at Sea: Conclusions and Recommendations From Recent Meetings and Expert Roundtables Convened by UNHCR* [Perlakuan terhadap Orang yang diselamatkan di Laut: Kesimpulan dan Rekomendasi dari pertemuan dan diskusi ahli baru-baru ini yang diselenggarakan oleh UNHCR], 28 November 2007, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/4782500d2.html>, hal. 3-4; UNHCR, "IMO Maritime Safety Committee, 95<sup>th</sup> Session: Remarks by José Riera, Special Adviser Reporting to the Assistant High Commissioner for Protection" [Komite Keselamatan Maritim IMO, sesi ke-95: Pidato oleh José Riera, Penasihat Khusus yang melapor ke Asisten Komisioner Tinggi untuk Perlindungan], 9 Juni 2015, tersedia di <http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/seamigration/Documents/UNHCR%20final%20%20Riera.pdf>.

Musim berlayar di Asia Tenggara kembali berlanjut saat laporan ini diselesaikan pada Oktober 2015, setelah musim hujan berakhir. UNHCR mengeluarkan peringatan pada Agustus bahwa keberangkatan melalui jalur laut diduga akan berlanjut setelah cuaca membaik. Mengingat perhatian internasional tentang perdagangan manusia, ada kemungkinan bahwa pelaku perdagangan akan mengubah pola mereka dan menggunakan rute baru untuk menghindarkan diri dari pengawasan.



© Amnesty International

Perahu ini mencapai Indonesia pada 10 Mei 2015, mengangkut 578 penumpang Rohingya dan Bangladesh, yang diselamatkan oleh nelayan lokal. Seorang pemuda lokal yang terlibat penyelamatan mengatakan perahunya sangat bau sehingga para penyelamat tidak bisa masuk.



© Amnesty International

Para Rohingya mendemonstrasikan bagaimana mereka harus duduk berdesakan di dalam perahu. Ketika mereka mencapai Indonesia, banyak yang mengalami kesulitan berjalan akibat harus mempertahankan posisi sempit selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dan pada akhirnya, harus diangkat keluar perahu.

Seorang anak perempuan Rohingya mempraktikkan keahlian menyulam di sebuah tempat penampungan di Aceh. Rohingya, yang merupakan Muslim, adalah kelompok minoritas keagamaan dan etnis di Myanmar yang didominasi beragama Buddha. Mereka kebanyakan tinggal di Negara Bagian Rakhine di Myanmar. Pihak berwenang pemerintah menyangkal keberadaan Rohingya, dan merujuk mereka sebagai Bengali, menunjukkan mereka adalah migran dari negara tetangga, Bangladesh.



Seorang pria Bangladesh berusia 21 tahun menunjukkan luka yang ia dapat dari pemukulan terus menerus di atas perahu besar yang berlokasi di dekat pesisir Thailand selama tujuh bulan. Ia mengatakan pada Amnesty International: "Saya tidak tahan dipukuli. Pernah saya mencoba loncat dari perahu- saya berpikir lebih baik loncat dan dimakan ikan lalu mati, daripada menderita akibat pemukulan setiap hari."





Seorang pemuda Rohingya menunjukkan luka yang ia dapat dari serangan pisau yang terjadi di Myanmar pada tahun 2012, ketika kekerasan sektarian pecah antara kaum Muslim dan Buddha. Rohingya menjadi korban penganiayaan aktor negara dan non-negara selama puluhan tahun.



Tiga anak laki-laki Rohingya di Aceh. Ada sejumlah besar anak-anak diantara Rohingya yang mencapai Indonesia pada Mei 2015



© Amnesty International

Lorong penampungan perempuan di tempat penampungan pencari suaka Rohingya di Aceh. Indonesia layak mendapat pujian karena mengkomodasi ratusan Rohingya pada Mei 2015. Namun secara jangka panjang, komunitas internasional harus menyediakan pendanaan yang memadai agar komunitas penjamu (seperti Aceh) dan organisasi internasional bisa memenuhi kebutuhan dasar Rohingya serta juga warga lokal.



© Amnesty International

Pria Rohingya dan seorang anak-anak di sebuah tempat penampungan di Aceh, Indonesia. Ratusan Rohingya Aceh kini menunggu permohonan suaka dan pemindahan ke negara ketiganya agar diproses.

## BAB 4: TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DI INDONESIA

### “Kami berikan apa yang kami punya.”

Warga Indonesia mendeskripsikan perlakuan orang-orang lokal terhadap Rohingya yang diselamatkan dekat Kuala Cankoi pada 10 Mei 2015

Pada Mei 2015, Indonesia mengizinkan mendaratnya sekitar 1.800 orang di Aceh, yang telah terdampar di laut dalam tiga perahu. Dari kelompok ini, UNHCR mendaftarkan sekitar 1.000 pencari suaka dari Myanmar,<sup>143</sup> dan 115 dari mereka telah berbicara dengan Amnesty International. Penumpang lainnya dinyatakan sebagai migran Bangladesh, dan pemulangan mereka secara bertahap dijalankan dengan bantuan IOM. Per 10 Agustus 2015, Rohingya yang baru saja tiba diakomodasikan di lima lokasi di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara: 315 di Lhokseumawe, 102 di Kuala Langsa, 159 di Lhok Bani, 331 di Bayeun, dan 43 di Medan.<sup>144</sup>

#### RESPON AWAL YANG MENGAGUMKAN

Indonesia harus dipuji dalam peran yang diperankannya dalam mengakomodasi ratusan Rohingya rentan yang tiba pada Mei 2015.

Sepengetahuan Amnesty International tidak ada dari mereka yang dipulangkan ke Myanmar. Ini merupakan pemenuhan kewajiban kebiasaan hukum internasional Indonesia untuk menghormati prinsip *non-refoulement* [perlindungan dari pemulangan paksa], yang melarang pemindahan individu ke Negara atau yurisdiksi lain yang mana mereka akan menghadapi risiko pelanggaran atau penyelewengan serius hak asasi manusia. Lebih lanjut, pemerintah pusat telah berkomitmen menampung para Rohingya hingga Mei 2016, dan telah menyediakan sumber daya untuk memberikan akomodasi dan membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka.

---

<sup>143</sup> UNHCR Indonesia, *Monthly Statistical Report: July 2015*, [Laporan Statistik Bulanan: Juli 2015] hal. 3.

<sup>144</sup> UNHCR, *Current Population of Rohingya Boat Arrivals in Aceh and North Sumatera*, [Populasi terkini Kedatangan Perahu Rohingya di Aceh dan Sumatera Utara], 10 Agustus 2015. Pada 20 Oktober, UNHCR menyampaikan ke Amnesty International bahwa dari kira-kira 1,000 Rohingya yang datang ke Aceh, hanya 640 masih berada.

Secara khusus, respons rakyat Aceh sangatlah mengagumkan dalam beberapa hal. Warga lokal menyelamatkan Rohingya dan menyediakan mereka penampungan, makanan, dan pakaian kering. Pemerintah lokal Aceh membantu dalam bantuan kemanusiaan, dan beberapa pihak berwenang lokal turut mengambil langkah-langkah bantuan tambahan. Misalnya, pihak berwenang di Lhokseumawe mendonasikan lahan untuk mengakomodasi ratusan orang yang datang dalam sebuah penampungan komunitas yang terintegrasi (*intergrated community shelter*, ICS) di Blang Adoe, yang dibangun untuk mengakomodasi Rohingya. Juga, banyak organisasi masyarakat sipil dari seantero wilayah turut bekerja membantu kebutuhan pokok Rohingya, seperti papan, pangan, air, kesehatan, dan pendidikan.

Kemudian, walau pemerintah pusat Indonesia hanya mengizinkan perahu mendarat sejak 20 Mei, pihak berwenang lokal di Aceh mengizinkan 578 orang mendarat pada 10 Mei (dengan bantuan warga lokal), dan nelayan Aceh menyelamatkan 820 penumpang pada 15 Mei dan 409 orang pada 20 Mei.<sup>145</sup> Di Kuala Cankoi, warga lokal yang turut membantu aksi penyelamatan pada 10 Mei mengatakan 10 perahu nelayan digunakan untuk membawa orang-orang tersebut ke daratan: “Kami membantu mereka berdasarkan rasa kemanusiaan, bukan agama. Kami melihat mereka dalam kondisi sangat buruk,”<sup>146</sup> ungkap mereka. Staf di sebuah organisasi masyarakat sipil Indonesia memuji respon warga lokal yang mereka saksikan di Kuala Cankoi, mengatakan “Warga lokal membantu para pengungsi seperti mereka membantu keluarga mereka sendiri.”<sup>147</sup> Staf tersebut mengatakan beberapa persahabatan terjalin antara Rohingya dan warga Kuala Cankoi, yang mana para Rohingya ditampung selama beberapa minggu.

Memang, beberapa Rohingya yang diwawancarai menyatakan rasa terima kasih atas perlakuan yang mereka terima setelah tiba di Aceh, seorang perempuan mengatakan: “Mereka berbuat banyak untuk kami- mereka memberikan kami baju, makanan, dan air. Bagaimana saya bisa mengucapkan terima kasih untuk ini? Mereka bahkan tidak kenal kami.”<sup>148</sup> Seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dari Sittwe mengatakan saat perahu mereka merapat ke daratan pertama kali, mereka takut terhadap warga lokal, namun “mereka menunjukkan keramahmatan, kami senang- mereka bantu kami begitu banyak.” Seorang perempuan dari Kuala Cankoi terus mengunjunginya di penampungan Blang Adoe, membawakannya hadiah seperti buah leci: “Saya memanggilnya Ibu,” ungkapnya.<sup>149</sup>

Respon rakyat Aceh ini mengejutkan mengingat konteks lokal. Area ini digunjang konflik yang menghancurkan dari 1989 hingga 2004, yang mana pihak berwenang Indonesia menjalankan operasi militer untuk menekan tuntutan separatisme; antara 10.000 hingga 30.000 orang terbunuh dalam konflik, kebanyakan warga sipil.<sup>150</sup> Aceh juga hancur porak-poranda akibat tsunami Desember 2004, yang mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal,

---

<sup>145</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements* [Asia Tenggara: Perpindahan Maritim Campuran] Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, p. 3-5.

<sup>146</sup> Wawancara Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>147</sup> Wawancara Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>148</sup> Wawancara Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>149</sup> Wawancara Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>150</sup> Amnesty International, *Time to Face the Past: Justice for Past Abuses in Indonesia's Aceh Province*, [Waktunya menghadapi masa lalu: Keadilan bagi pelanggaran masa lampau di Provinsi Aceh, Indonesia] ASA 21/001/2013, tersedia di <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/001/2013/en/>, hal. 9.

hilang atau terusir dari asalnya.<sup>151</sup> Sebelas tahun kemudian, Aceh tetap menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dengan tingkat putus sekolah dan pengangguran pemuda yang tinggi.<sup>152</sup> Sebuah organisasi masyarakat sipil memperkirakan pengangguran lokal di Aceh sekitar 40%, dengan banyak orang Aceh meninggalkan Indonesia untuk mencari pekerjaan di Malaysia.<sup>153</sup>

## KEHAWATIRAN JANGKA PANJANG

Secara jangka panjang, Amnesty International memiliki kekhawatiran mengenai situasi Rohingya di Aceh.

Pemerintah pusat belum mengkonfirmasi apakah Rohingya yang tiba sejak Mei 2015 akan terus diizinkan tinggal melebihi waktu yang ditetapkan pada Mei 2016, walaupun penentuan permohonan suaka dan pemindahan ke Negara ketiga (*resettlement*) akan memakan waktu bertahun-tahun. Berdasarkan prinsip *non-refoulement*, situasi buruk di Myanmar bisa mendorong Indonesia untuk menawarkan perlindungan jangka panjang kepada para Rohingya.

Lalu, pemberian akomodasi para Rohingya di Aceh masih terkonseptualisasi sebagai respon yang reaktif dan darurat. Pada Agustus 2015, pihak berwenang lokal mengatakan mereka kesulitan membuat rencana bagi warga Rohingya karena pemerintah pusat belum meninformasikan mereka tentang jangka waktu.<sup>154</sup> Lalu, walau ada kelompok kerja dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah tersebut,<sup>155</sup> seorang pejabat tinggi mengatakan pada Amnesty International, dengan syarat dijadikan anonim, bahwa hanya sedikit terjadi koordinasi peran dan tanggungjawab.

Kurangnya kejelasan ini bisa disebabkan tidak adanya kerangka hukum operasional yang jelas untuk pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengakui hak mencari suaka,<sup>156</sup> dan sejak 2011, pihak berwenang telah menyusun Peraturan Presiden tentang pencari suaka dan pengungsi.<sup>157</sup> Sumber yang dapat dipercaya, yang telah membaca rancangan yang paling akhir, per April 2015, mengatakan rancangannya positif.<sup>158</sup> Sementara itu, mereka yang bekerja terkait pengungsi di negara tersebut, beroperasi

---

<sup>151</sup> Abdur Rofi, Shannon Doocy, dan Courtland Robinson, "Tsunami Mortality and Displacement in Aceh Province, Indonesia," [Moralitas Tsunami dan Perpindahan paksa di Provinsi Aceh, Indonesia], *Disasters* 30.3 (2006): hal. 340.

<sup>152</sup> UN Indonesia, "Where We Work: Aceh," [Di mana kami bekerja: Aceh] 2015, tersedia di <http://www.un.or.id/en/where-we-work/geographic-focus/aceh>.

<sup>153</sup> Wawancara Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>154</sup> Wawancara Aceh, 11 Agustus 2015.

<sup>155</sup> Keputusan Bupati Aceh Utara No. 100/855/2015. Tentang pembentukan Taskforce pencari suaka di Kabupaten Aceh Utara.

<sup>156</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang dasar 1945 Republik Indonesia, sebagaimana diamendemen oleh Amendemen pertama tahun 1999, Amendemen kedua tahun 2000, Amendemen ketiga tahun 2001, dan Amendemen kedua tahun 2002, tersedia di [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=200129](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=200129), Pasal. 28(G).

<sup>157</sup> Suaka, "Legal Framework and Role of UNHCR to RSD," [Kerangka kerja dan peran UNHCR dalam RSD] 9 Juli 2015, tersedia di <http://suaka.or.id/2015/07/09/legal-framework-and-role-of-unhcr-to-rsd/#more-474>.

<sup>158</sup> Sumber-sumber ini berbicara dalam kondisi anonimitas. Wawancara di Jakarta Wawancara di Jakarta, 22 dan 24 Agustus 2015.

berdasarkan Peraturan tahun 2010, yang mana semua pengungsi dan pencari suaka berdasarkan dugaan, diperlakukan sebagai “migran ilegal” dan pada masa-masa awal menjadi subjek penahanan wajib.<sup>159</sup>

Kapasitas UNHCR, yang menentukan laju pemindahan ke negara ketiga (*resettlement*) dan penentuan status pengungsi (*refugee status determination*, RSD), merupakan penyebab kekhawatiran lainnya. Di Indonesia, yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, UNHCR bertanggungjawab penuh untuk RSD; ini adalah negara dengan populasi 250 juta jiwa tersebar di ribuan pulau, dan saat ini menjamu 13.170 “orang-orang yang menjadi perhatian”<sup>160</sup> (*persons of concern*) bagi UNHCR.<sup>161</sup> Badan ini harus melakukannya dengan anggaran 4,2 juta USD (untuk 2015), dan staf berjumlah 68 orang.<sup>162</sup> Waktu rata-rata untuk menyelesaikan prosedur RSD pada tahun 2012 berkisar 34-47 bulan.<sup>163</sup> Tidak ada data yang tersedia secara publik tentang waktu rerata antara keputusan positif RSD dan keberangkatan ke negara ketiga, namun UNHCR melaporkan 898 orang meninggalkan Indonesia untuk pemindahan ke negara ketiga pada 2013, dan 838 keberangkatan pada 2014.<sup>164</sup>

## HIDUP DALAM PENANTIAN

Selain investigasi di Aceh, Amnesty International melakukan riset di kelompok lain di Indonesia. Delegasi Amnesty International bertemu dengan 34 pengungsi dan pencari suaka di Cisarua dan Jakarta yang telah berada di Indonesia selama beberapa bulan dan beberapa tahun, dan tinggal di penampungan yang dikelola oleh lembaga-lembaga kemanusiaan. Mereka berasal dari berbagai negara, termasuk Afghanistan, Ethiopia, Iran, Myanmar, Pakistan, dan Somalia. Di Kupang, delegasi Amnesty International melakukan wawancara kelompok dengan 30 orang Afghan dan tambahan dua wawancara mendalam dengan orang Afghanistan.

Pernyataan-pernyataan mereka membuktikan penderitaan yang dialami oleh mereka yang hidupnya dalam penantian di Indonesia, ketika mereka menunggu keputusan penentuan status pengungsi (*refugee status*

<sup>159</sup> Republik Indonesia, Indonesia: Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi No. IMI.1489.UM.08.05 tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal, 17 September 2010, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/3ed8eb5d4.html>.

<sup>160</sup> Orang yang menjadi perhatian “berisikan secara umum lima kategori orang yang jatuh dalam kompetensi Komisioner Tinggi. Kelompok ini adalah (a) mereka yang masuk dalam kategori definisi Statuta/ Konvensi 1951 sehingga berhak menikmati serangkaian fungsi dari kantor tersebut; (b) mereka yang berada dalam kategori lebih luas namun diakui negara berhak atas perlindungan dan bantuan kantor; (c) mereka yang Komisioner Tinggi berikan “itikad baik kantor”, terutama namun bukan saja untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan; (d) pengungsi yang kembali, yang mana Komisioner Tinggi bisa menyediakan bantuan reintegrasi dan perlindungan lainnya; dan (e) orang tanpa kewarganegaraan yang bukan pengungsi yang mana UNHCR memiliki mandat terbatas untuk membantunya.” UNHCR, *Protection of Persons of Concern to UNHCR Who Fall Outside the 1951 Convention: A Discussion Note*, [Perlindungan orang yang menjadi perhatian UNHCR yang jatuh diluar Konvensi 1951: Sebuah catatan diskusi] 2 April 1992, tersedia di [http://www.unhcr.org/3ae68cc518.html#\\_ftn1](http://www.unhcr.org/3ae68cc518.html#_ftn1), paragraf. 11.

<sup>161</sup> UNHCR Indonesia, *Monthly Statistical Report: July 2015*, [Laporan Statistik Bulanan: Juli 2015] p. 1.

<sup>162</sup> Wawancara di Jakarta, 24 Agustus 2015.

<sup>163</sup> Jesuit Refugee Services, Sebuah Penarian: Ruang Perlindungan di Malaysia, Thailand, Indonesia, Kamboja dan Filipina [*The Search: Protection Space in Malaysia, Thailand, Indonesia, Cambodia and the Philippines*], 2012, tersedia di [http://www.jrs.net/Assets/Regions/APR/media/files/The\\_Search.pdf](http://www.jrs.net/Assets/Regions/APR/media/files/The_Search.pdf), hal. 34.

<sup>164</sup> UNHCR Indonesia, *Monthly Statistical Report: July 2015*, [Laporan Statistik Bulanan: Juli 2015] p. 5.

*determination*, RSD) dan pemindahan ke negara ketiga, karena mereka tidak diizinkan bekerja dan tidak menerima bantuan sosial.<sup>165</sup>

Mereka yang diwawancara sering mengekspresikan keputusasaan mereka karena harus selama berbulan-bulan - dan terkadang tahunan- mereka menanti keputusan RSD dan pemindahan ke negara ketiga. Seorang lelaki Afghanistan yang menerima ancaman mati dari Taliban pergi ke Indonesia tahun 2012. Dia mengatakan pada delegasi Amnesty International: "Saya melarikan diri dari kematian kilat, namun di sini saya mati hari demi hari."<sup>166</sup> Dia menerima keputusan RSD positif, namun sebulan setelah wawancara pemindahan negara ketiga dengan Kedutaan besar Australia, staf kedutaan meneleponnya dan mengatakan ia ditolak. Dia mengatakan pada Amnesty International: "Aku belum tahu alasannya apa." Seorang lelaki Afghanistan, peternak berusia 30 tahun, juga mengatakan permohonan pemindahan negara ketiganya ditolak oleh Australia dengan alasan yang tidak jelas baginya. Dia mengatakan telah menerima surat dengan serangkaian pasal hukum, tidak ada yang lain.<sup>167</sup> Orang-orang ini percaya permohonan pemindahan negara ketiga mereka akan dikirim ke kedutaan negara lain, dan sedang menunggu keputusan.

Penantian ini sangat melelahkan bagi semua pencari suaka, namun terutama tak tertahankan bagi anak muda. Seorang lelaki muda Afghanistan berusia 17 tahun yang tumbuh di Quetta, Pakistan menceritakan pada Amnesty International: "Pada fase kehidupan kami saat ini, seharusnya kami mengembangkan keahlian kami, kami seharusnya mendapatkan pendidikan namun yang bisa kami lakukan hanya makan dan tidur.[...] Semua berhenti. Yang berlalu hanya hidup saya."<sup>168</sup> Seorang perempuan berusia 30 tahun yang pernah menjadi akuntan mengatakan: "Bagiku, ini seperti mengulang dari kelas nol. Saya telah kehilangan semua energi dan potensi saya. Kami tidak bisa melanjutkan pendidikan kami."<sup>169</sup> Seorang pemuda Afghanistan di Kupang mengutarakan kefrustrasiannya dan teman-temannya atas keterpaksaan tidak bisa melakukan apa-apa; tidak ada yang bisa mereka lakukan di tempat mereka tinggal, dan mereka tidak diizinkan pergi: "Kami merasa depresi dan sangat sedih- kami tidak bisa pergi keluar, dan tidak ada aktivitas."<sup>170</sup>

Secara khusus, Amnesty International khawatir terhadap kebutuhan psikososial anak-anak pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di penampungan yang dikelola lembaga kemanusiaan. Delegasi Amnesty International berjumpa dengan sejumlah anak yang kesehatan kejiwaannya tampak sangat rapuh.

Misalnya, anggota delegasi berbicara dengan anak lelaki tanpa pendampingan berusia 15 tahun dari Mogadishu, Somalia. Pada tahun 2012 keluarganya lari ke Yemen setelah dua pamannya dibunuh oleh Al Shabab. Pada bulan Maret 2014 ia kembali dari pekerjaannya mencuci mobil dan menemukan rumahnya telah hancur; tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan keluarganya. Dia mengatakan penyeludup membawanya ke Indonesia melalui Malaysia. Dia berkata: "Pada malam hari saya hanya menangis dan bermimpi buruk."<sup>171</sup>

Anak lelaki tanpa pendampingan berusia 15 tahun lain mengatakan dia hidup tuna wisma selama tiga bulan

<sup>165</sup> Suaka, "Refugees and Asylum Seekers in Indonesia," [Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia] 6 Juli 2015, tersedia di <http://suaka.or.id/2015/07/06/refugees-and-asylum-seekers-in-indonesia/#more-415>.

<sup>166</sup> Wawancara di Cisarua, 19 Agustus 2015.

<sup>167</sup> Wawancara di Kupang, 18 Agustus 2015.

<sup>168</sup> Wawancara di Jakarta, 20 Agustus 2015.

<sup>169</sup> Wawancara di Jakarta, 19 Agustus 2015.

<sup>170</sup> Wawancara di Kupang, 22 Agustus 2015.

<sup>171</sup> Wawancara di Jakarta, 20 Agustus 2015.

ketika pertama datang ke Indonesia, hingga dia mendengar adanya penampungan yang dikelola sebuah lembaga kemanusiaan. Dia mengatakan: “Saya telah tinggal di penampungan selama dua minggu dan ini lebih baik dari sebelumnya, namun saya terus membayangkan masa lampau, saya tidak bisa menghapusnya dari pikiran saya.” Ketika ditanya soal masa depannya dia menjawab: “Saya sudah kehilangan harapan.”<sup>172</sup>

Ketika ditanya pertanyaan yang sama, seorang anak lelaki yatim piatu Tamil dari Sri Lanka berusia 15 tahun hanya menggelengkan kepala, berkata: “Ibuku, bapakku.” Dia melihat orangtuanya terbunuh tahun 2009 ketika sebuah bom menghancurkan rumah mereka.<sup>173</sup>

Penyebab kekhawatiran lainnya adalah memenuhi kebutuhan Rohingya yang baru saja datang di Aceh, hingga mereka dipindahkan ke negara ketiga. Di satu sisi, sebagaimana diketahui oleh para Rohingya, Aceh memiliki tingkat pengangguran tinggi. Beberapa yang diwawancara oleh Amnesty International mengatakan mereka khawatir, jika diizinkan bekerja, mereka tidak bisa menyokong diri mereka sendiri. Seorang lelaki berusia 22 tahun berkata: “Saya bersyukur bisa berada di Indonesia. Namun warga setempat sendiri pergi ke Malaysia untuk bekerja, jadi saya tidak merasa bisa menyokong keluarga saya.”<sup>174</sup> Di sisi lain, jika Rohingya terus diberi bantuan papan dan pangan, warga lokal bisa cemburu. Seorang perempuan Aceh dilaporkan mengeluh pada pekerja organisasi non-pemerintah (Ornop) bahwa tingkat kehidupan di Penampungan Komunitas Terintegrasi Blang Adoe lebih baik daripada orang lokal.<sup>175</sup>

Amnesty International memiliki kekhawatiran kebutuhan dasar Rohingya di beberapa lokasi di Aceh tidak terpenuhi. Delegasi memperhatikan standar buruk sanitasi, kurangnya perlindungan dari elemen luar, serta fasilitas masak yang tidak bersih. Rohingya di beberapa lokasi mengeluhkan kualitas makanan. Dukungan psikososial tampaknya minim, terutama untuk lelaki dan anak lelaki, serta tiadanya penerjemah membuat penyediaan jasa tersebut menjadi sulit.

Sebagian besar Rohingya yang baru saja tiba adalah anak-anak; dari populasi sekitar 950 orang, 521 – atau 55% – adalah anak-anak, dan 328 – atau 34% – adalah anak tanpa pendampingan atau anak yang terpisah dari keluarganya.<sup>176</sup> Walau tempat para Rohingya tinggal di Aceh secara resmi tidak disebut fasilitas tahanan, dalam praktik perpindahan penghuni dibatasi dan mereka bisa dianggap ditahan. Amnesty International khawatir akan berlangsungnya penahanan atas anak, karena tahanan tidak pernah menjadi kepentingan terbaik bagi mereka.<sup>177</sup> Efek jangka panjang penahanan imigrasi bagi anak cukup dikenal luas; dalam salah satu penelitian, sepertiga anak yang ditahan di Australia mengalami

<sup>172</sup> Wawancara di Jakarta, 21 Agustus 2015.

<sup>173</sup> Wawancara di Jakarta, 20 Agustus 2015.

<sup>174</sup> Wawancara Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>175</sup> Wawancara Aceh, 13 Agustus 2015.

<sup>176</sup> UNHCR, *Current Population of Rohingya Boat Arrivals in Aceh and North Sumatera*, [Populasi terkini Kedatangan Perahu Rohingya di Aceh dan Sumatera Utara] 10 Agustus 2015.

<sup>177</sup> Konvensi Hak Anak, UNTS, vol. 1577, p. 3 (20 November 1989), Pasal. 3(1); Komite Hak Anak PBB, Laporan 2012, hari diskusi umum tentang hak anak dalam konteks migrasi internasional, Februari 2013, paragraf. 78, tersedia di [www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC\\_DGD-Childrens\\_Rights\\_InternationalMigration.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/2012CRC_DGD-Childrens_Rights_InternationalMigration.pdf).

gangguan kesehatan mental sehingga membutuhkan dukungan psikiater.<sup>178</sup>

Amnesty International juga khawatir dengan keselamatan Rohingya di Aceh. Seorang lelaki Rohingya memberitahu Amnesty International bahwa gerombolan warga lokal memasuki wilayah mereka untuk merampok dan memukuli para Rohingya.<sup>179</sup> Banyak orang mengeluhkan tentang staf keamanan di wilayah para Rohingya diakomodasi. Petugas keamanan dituduh melakukan penganiayaan dan intimidasi, dan petugas polisi lelaki lokal dituduh melakukan perogohan badan secara tidak senonoh kepada pencari suaka Rohingya perempuan.<sup>180</sup> Kemudian, orang yang tinggal di lokasi yang dikunjungi Amnesty International tampak tidak terlindungi dengan layak, dari jangkauan penyelundup dan pedagang manusia yang ingin mengambil keuntungan dari mereka, yang putus asa dan tidak sabar dengan kondisi kehidupan mereka, untuk segera mencapai Malaysia.

Beberapa minggu setelah penelitian Amnesty International ke penampungan Blang Adoe di Aceh, ada pemberitaan tentang pemukulan dan pemerkosaan Rohingya oleh warga lokal. Menyusul tuduhan pemerkosaan tersebut, termasuk terhadap seorang perempuan berusia 14 tahun, lebih dari 200 Rohingya meninggalkan lokasi tersebut namun akhirnya kembali. Ketika laporan ini sedang diselesaikan pada pertengahan Oktober 2015, polisi lokal mengatakan mereka sedang menginvestigasi laporan ini.<sup>181</sup>

## KURANGNYA DUKUNGAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL

Dukungan regional dan internasional pada masa dan setelah krisis di laut pada Mei 2015 tidaklah cukup. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*, ASEAN) menggelar beberapa pertemuan multilateral semasa dan setelah krisis, namun gagal mengambil tindakan cepat dan koheren.<sup>182</sup> UNHCR mengajukan permohonan pendanaan 13 Juta USD untuk menangani krisis, namun hingga akhir Agustus 2015, permohonan ini hanya didanai sebanyak 20%.<sup>183</sup> Walau Australia memberikan 749.000 USD untuk permohonan UNHCR,<sup>184</sup> Australia tidak menggelar sedikitpun dari kekuatan lautnya yang besar untuk membantu pencarian dan penyelamatan. Kemudian, Australia menolak

<sup>178</sup> Australian Human Rights Commission, *The Forgotten Children: National Inquiry into Children in Immigration Detention*, [Anak-anak yang terlupakan: Penyelidikan nasional terhadap anak di tahanan imigrasi] 2014, tersedia di

[https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/forgotten\\_children\\_2014.pdf](https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/document/publication/forgotten_children_2014.pdf).

<sup>179</sup> Wawancara Aceh, 14 Agustus 2015.

<sup>180</sup> Wawancara di Jakarta, 24 Agustus 2015.

<sup>181</sup> Associated Press, "Alleged Rapes Spur Rohingya Upheaval in Indonesia Camp" [Tuduhan pemerkosaan mengakibatkan gejolak Rohingya di Kamp Indonesia], *The Irrawaddy*, 30 September 2015, tersedia di <http://www.irrawaddy.org/asia/alleged-rapes-spur-rohingya-upheaval-in-indonesia-camp.html>.

<sup>182</sup> Amnesty International, "South East Asia: Inaction Paves the Way for Future Refugee Disaster," [Asia Tenggara: Tidak adanya tindakan akan membuka jalan bagi bencana pengungsi di masa depan] 2 Juli 2015, tersedia di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/07/south-east-asia-inaction-paves-the-way-for-future-refugee-disaster/>; Mong Palatino, "ASEAN's Response to Rohingya Crisis Falls Short," [Respon ASEAN terhadap krisis Rohingya masih kurang] *The Diplomat*, 2 Juni 2015, tersedia di [http://thediplomat.com/2015/06/aseans-response-to-rohingya-crisis-falls-short/?\\_sm\\_au=iVV9zrkprV9LjbDP](http://thediplomat.com/2015/06/aseans-response-to-rohingya-crisis-falls-short/?_sm_au=iVV9zrkprV9LjbDP).

<sup>183</sup> UNHCR, "UNHCR Urges States to Help Avert Bay of Bengal Boat Crisis in Coming Weeks," [UNHCR mendesak negara agar membantu menghindari krisis perahu Teluk Bengal dalam minggu-minggu ke depan] 28 Agustus 2015, tersedia di <http://www.unhcr.org/55e063359.html>.

<sup>184</sup> UNHCR, *South-East Asia: Mixed Maritime Movements*, [Asia Tenggara: Perpindahan Campuran di Laut] Juni 2015, tersedia di <http://www.refworld.org/docid/55e6c1994.html>, hal. 7.

menerima perpindahan sebagai negara ketiga atas Rohingya yang tiba di Indonesia pada Mei 2015,<sup>185</sup> atau mencabut kebijakannya yang menghentikan menerima perpindahan pengungsi yang mendaftar dengan UNHCR- Indonesia setelah 1 Juli 2014.<sup>186</sup> Mirip dengannya, India, yang kekuatan angkatan lautnya terlibat dalam operasi penyelamatan Rohingya di Teluk Bengal di masa lampau,<sup>187</sup> tidak mengambil peran dalam krisis Mei 2015. Tidak juga Cina, yang telah membangun kekuatan angkatan lautnya di Teluk Bengal dan Laut Andaman.<sup>188</sup>

## KESIMPULAN

Indonesia layak mendapatkan pengakuan untuk responnya atas kedatangan Rohingya pada Mei 2015. Sebagaimana dibahas dalam bab ini, pihak berwenang Indonesia telah mencurahkan sumber daya mereka dan bekerja sama dengan IOM, UNHCR dan masyarakat sipil, bekerja untuk penghormatan HAM dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Namun, untuk respon jangka panjang yang memadai, komunitas Internasional harus mematuhi prinsip berbagi tanggung jawab yang tersirat dalam Konvensi Pengungsi, dan menyediakan pendanaan yang cukup agar komunitas tuan rumah (seperti Aceh) dan lembaga internasional, bisa memenuhi kebutuhan para Rohingya dan juga warga lokal. Sebagai bagian dari respon yang memadai, permohonan pendanaan regional UNHCR sebesar 13 Juta USD harus dipenuhi. Sebagai tambahan, komunitas internasional harus meningkatkan alokasi perpindahan negara ketiga bagi pengungsi Rohingya, termasuk bagi anak tanpa pendampingan, dan Australia harus mengizinkan permohonan perpindahan pengungsi yang terdaftar di Indonesia. ASEAN dan negara-negara Asia Pasifik- seperti Australia, Cina, dan India – sebagaimana juga Amerika Serikat, yang sudah memberikan komitmen bantuan sumber daya- harus menyediakan bantuan teknis untuk membantu pencarian dan penyelamatan, serta membantu pendanaan agar menjamin berlangsungnya penerimaan secara kemanusiaan atas mereka yang baru saja mendarat.

Selanjutnya, Indonesia harus menegaskan bahwa Rohingya di Aceh tetap diizinkan tinggal melebihi Mei 2016, dalam rangka memberikan waktu yang cukup untuk memproses permohonan suaka dan perpindahan negara ketiga. Indonesia juga perlu terus mengembangkan kerangka kerja operasional yang jelas bagi pengungsi dan pencari suaka di negeri tersebut.

IOM dan UNHCR harus terus bekerjasama dengan pihak berwenang Indonesia untuk menyediakan alternatif atas penahanan bagi Rohingya yang baru tiba di Aceh, termasuk bagi

---

<sup>185</sup> Shalailah Medhora, "'Nope, Nope, Nope': Tony Abbott Says Australia Will Take No Rohingya Refugees," ["Tidak, tidak, tidak": Tony Abbot berkata Australia tidak akan mengambil pengungsi Rohingya, *The Guardian*, 21 May 2015, tersedia di <http://www.theguardian.com/world/2015/may/21/nope-nope-nope-tony-abbott-says-australia-will-take-no-rohingya-refugees>.

<sup>186</sup> Kedutaan Besar Australia di Thailand, "Changes to Resettlement Another Blow to People Smugglers," [Perubahan atas perpindahan negara ketiga pukulan baru bagi pedagang manusia], 18 November 2014, tersedia di [http://thailand.embassy.gov.au/bkok/PR2014\\_resettlement\\_people\\_smugglers.html](http://thailand.embassy.gov.au/bkok/PR2014_resettlement_people_smugglers.html).

<sup>187</sup> K. Yhome, "Rohingyas Adrift, Far From the Shores of Asia's Conscience," [Rohingya terombang-ambing, jauh dari daratan kesadaran Asia] *The Wire*, 21 Mei 2015, tersedia di <http://thewire.in/2015/05/21/rohingyas-adrift-far-from-the-shores-of-asias-conscience-2149/>.

<sup>188</sup> Namrata Goswami, "China's Second Coast: Implications for Northeast India," [Pantai kedua Cina: Implikasi bagi Timur Laut India] *Institute for Defence Studies and Analysis*, 19 Juni 2014, tersedia di [http://www.idsa.in/idsacomments/ChinasSecondCoast\\_ngoswami\\_190614.html](http://www.idsa.in/idsacomments/ChinasSecondCoast_ngoswami_190614.html).

anak-anak tanpa pendampingan. Badan-badan tersebut juga harus menjamin keamanan Rohingya di Aceh, termasuk dengan memastikan pelatihan dan pengawasan yang layak atas petugas keamanan dan polisi, menginvestigasi tuduhan tindakan yang salah, dan meningkatkan jumlah petugas keamanan perempuan.

# BAB 5: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## KESIMPULAN

Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan ribu orang yang putus asa telah melakukan perjalanan berbahaya dengan perahu di Teluk Bengal dan Laut Andaman. Mereka yang banyak melarikan diri adalah warga Rohingya, populasi Muslim teraniaya dari Myanmar, yang terus mengalami diskriminasi dan pelanggaran HAM yang luas. Mengingat skala dan tingkat keparahan pelanggaran HAM di Myanmar, Amnesty International menganggap bahwa kebanyakan orang Rohingya yang berada di luar negaranya kemungkinan besar adalah pengungsi.

Pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia yang kejam telah mengeksploitasi kerentanan dan keputusasaan warga Rohingya. Banyak dari mereka yang melarikan diri Myanmar dengan perahu pada tahun 2015 hanya mendapatkan mimpi buruk. Mereka mengalami penganiayaan mengerikan di tangan awak perahu - termasuk pembunuhan, pemukulan, dan pemukulan untuk tebusan - dan disekap selama beberapa minggu atau bulan dalam kondisi tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia.

Perjalanan mengerikan ini bahkan menjadi lebih berbahaya pada Mei 2015, setelah tindakan keras pemerintah Thailand untuk memberantas perdagangan manusia, awak perahu meninggalkan perahu di perairan terbuka. Ribuan pengungsi dan migran terdampar di laut selama berminggu-minggu, dan akhirnya diizinkan ditampung sementara oleh Indonesia dan Malaysia.

Dengan berakhirnya musim hujan dan antisipasi keberangkatan manusia perahu dalam perjalanan berbahaya yang akan mulai lagi pada bulan Oktober 2015, Amnesty International menyerukan pada pemerintah untuk mengambil tindakan segera untuk mengatasi krisis pengungsi dan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Myanmar harus menghentikan diskriminasi terhadap Rohingya dan memberikan mereka akses yang sama terhadap hak-hak kewarganegaraan dan perlindungan yang sama di bawah hukum. Pemerintah Asia Tenggara dan Selatan -terutama Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Thailand - harus bekerja sama untuk menyusun langkah-langkah efektif untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi orang dari pelanggaran HAM oleh para pedagang dan penyelundup manusia. Sangat penting bagi pemerintah Asia Tenggara untuk belajar dari krisis 2015 Mei untuk mencegah krisis HAM lainnya di laut. Mereka juga harus memastikan bahwa inisiatif terhadap para pelaku perdagangan manusia tidak membahayakan kehidupan manusia di lautan, dan tidak menjebak orang di Myanmar dan Bangladesh tanpa cara melarikan diri. Amnesty International menyerukan kepada negara-negara Asia Tenggara untuk memastikan bahwa dalam setiap upaya penegakan hukum terhadap para pelaku perdagangan manusia, pemerintah melakukan pemantauan dan identifikasi terus menerus untuk menyelamatkan korban perdagangan manusia, dan melakukan operasi pencarian dan penyelamatan yang

efektif ditambah dengan prosedur pendaratan yang aman dan dapat diprediksi. Semua korban perdagangan manusia harus diberikan bantuan yang layak.

Negara yang menjadi tuan rumah, termasuk Indonesia, harus menghormati larangan *non-refoulement* dan tidak memindahkan individu ke negara atau wilayah lain di mana mereka akan menghadapi risiko nyata pelanggaran HAM atau kekerasan serius. Indonesia harus terus mengembangkan kerangka hukum dan operasional yang jelas untuk semua pengungsi dan pencari suaka di negara ini dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan masyarakat sipil untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Amnesty International juga mendesak masyarakat internasional untuk memberikan bantuan teknis, dukungan dana, dan komitmen pemindahan ke negara ketiga kepada Asia Tenggara.

## REKOMENDASI

### UNTUK PEMERINTAH MYANMAR

- Menghentikan kekerasan aparat keamanan terhadap orang-orang Rohingya dan melindungi Rohingya dari kekerasan oleh aktor non-negara seperti para rahib;
- Memastikan Rohingya memiliki akses yang sama akan hak-hak kewarganegaraan berdasarkan kriteria objektif yang sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, termasuk dengan mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 (*1982 Citizenship Act*);
- Memastikan bahwa warga Rohingya memiliki perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi dan menghapus semua pembatasan yang bersifat diskriminatif atas kebebasan bergerak di negara bagian Rakhine;
- Melakukan investigasi independen, imparial dan efektif atas semua insiden kekerasan sektarian, termasuk kekerasan di negara bagian Rakhine pada tahun 2012, dan mengadakan pengadilan yang adil semua orang yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan atau provokasi kebencian rasial atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan;
- Mencabut UU Pernikahan Khusus Perempuan Buddha (*Buddhist Women's Special Marriage Law*) dan UU Hukum Konversi Agama dan (*Religious Conversion Law*) dan mengubah UU Kontrol Kesehatan Populasi (*Population Control Healthcare Law*) dan UU Monogami (*Monogamy Law*) agar sejalan dengan hukum dan standar HAM internasional

### UNTUK PEMERINTAH INDONESIA

- Membiarkan Rohingya untuk tetap tinggal di negara itu hingga permohonan pengajuan suaka dan pemindahan ke negara ketiga mereka selesai diproses;
- Mempublikasikan dan menerapkan rancangan Peraturan Presiden tentang pencari suaka dan pengungsi dan mengembangkan kerangka hukum operasional yang jelas untuk pencari suaka dan pengungsi;
- Memberikan bantuan yang tepat untuk semua pencari suaka dan pengungsi untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi;
- Benar-benar menginvestigasi tuduhan pemerkosaan dan pemukulan di penampungan

warga Rohingya di Blang Adoe;

#### UNTUK PEMERINTAH INDONESIA, MALAYSIA DAN THAILAND

- Menghormati prinsip-prinsip *non-refoulement* (tidak memulangkan paksa);
- Meratifikasi Konvensi Pengungsi dan menjamin akses ke prosedur penentuan status pengungsi (RSD);
- Memastikan bahwa individu tidak dikriminalisasi, ditahan atau dihukum semata-mata karena cara kedatangan mereka di sebuah negara;
- Mempertimbangkan untuk memperluas akses bagi alur migrasi reguler, seperti migrasi untuk tujuan reunifikasi keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja;
- Bekerja sama untuk menempatkan langkah-langkah efektif untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi orang-orang dari pelanggaran HAM oleh para pedagang dan penyelundup manusia. Hal ini memerlukan antara lain, sistem untuk memantau kapal di perairan teritorial dan di laut lepas, untuk mengidentifikasi dan menyelamatkan korban perdagangan manusia atau lainnya yang sedang mengalami pelanggaran HAM serius;
- Mengembangkan operasi pencarian dan penyelamatan terkoordinasi di Teluk Bengal dan Laut Andaman, dengan prosedur pendaratan yang aman dan dapat diprediksi, dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan organisasi-organisasi kemanusiaan untuk memastikan orang-orang yang baru mendarat mendapat penerimaan manusiawi;
- Menetapkan mekanisme akuntabilitas untuk mendorong dan mengawasi kepatuhan terhadap kewajiban pencarian dan penyelamatan, dan berkomitmen untuk melaksanakan penyelidikan imparial dan independen untuk setiap kegagalan dalam melindungi kehidupan di laut dan untuk bekerja sama dengan penyelidikan tersebut;
- Menyelidiki dan membawa mereka yang bertanggung jawab, yang terlibat dalam, atau memfasilitasi perdagangan manusia ke hadapan pengadilan, dan membantu pemulihan fisik dan psikososial korban perdagangan manusia;
- Memastikan bahwa setiap tindakan terhadap pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia dilakukan melalui langkah-langkah penegakan hukum, yang diatur oleh hukum dan standar HAM internasional, dan bahwa hal itu tidak membahayakan kehidupan para pengungsi dan migran di laut, atau tidak menjebak orang-orang di Myanmar dan Bangladesh tanpa jalan keluar;
- Bekerja sama untuk mengembangkan sistem pelacakan dan identifikasi pengungsi dan migran yang mati atau hilang di laut;

#### UNTUK PEMERINTAH BANGLADESH

- Menghormati prinsip-prinsip *non-refoulement*;
- Memberikan bantuan yang tepat untuk korban perdagangan manusia yang dipulangkan;

- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan organisasi-organisasi kemanusiaan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar Rohingya terpenuhi;

#### UNTUK PEMERINTAH AUSTRALIA

- Mengubah kebijakan *non-resettlement* (tidak lagi menerima pemindahan ke negara ketiga) bagi pengungsi yang terdaftar di UNHCR-Indonesia setelah 1 Juli 2014;

#### UNTUK IOM AND UNHCR

- Memastikan pelatihan dan pengawasan yang tepat bagi staf keamanan dan polisi di Indonesia;
- Benar-benar menyelidiki tuduhan kesalahan yang dilakukan oleh staf keamanan dan polisi dan memastikan jumlah staf keamanan perempuan yang memadai di fasilitas penahanan di Indonesia;
- Terus bekerja dengan pihak berwenang Indonesia untuk memberikan alternatif untuk penahanan, termasuk untuk anak-anak yang tak memiliki pendamping, seraya memastikan keselamatan mereka;

#### UNTUK ASEAN

- Mendukung negara dalam menyusun langkah-langkah bersama yang efektif dan terkoordinasi untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi orang-orang dari pelanggaran HAM oleh para pedagang dan penyelundup manusia. Memastikan bahwa setiap tindakan terhadap pelaku penyelundupan dan perdagangan manusia dilakukan melalui langkah-langkah penegakan hukum, yang diatur oleh hukum dan standar HAM internasional, dan bahwa hal itu tidak membahayakan kehidupan para pengungsi dan migran di laut;
- Mendukung negara dalam mengembangkan operasi pencarian dan penyelamatan terkoordinasi di Teluk Bengal dan Laut Andaman, dengan prosedur pendaratan yang aman dan dapat diprediksi;

#### UNTUK KOMUNITAS INTERNASIONAL


- Memberikan bantuan dan peralatan teknis untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan di Teluk Bengal dan Laut Andaman;
- Meningkatkan pendanaan untuk UNHCR, termasuk dengan memenuhi permohonan regional sebesar 13 juta USD untuk merespon dan mencari solusi bagi krisis maritim yang terjadi baru-baru ini;
- Meningkatkan pendanaan untuk mendukung baik pengungsi dan masyarakat lokal yang menjadi tuan rumah dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka akan tempat tinggal, makanan, air, pendidikan, dan kesehatan;
- Menyediakan dana yang memadai untuk Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk memastikan penerimaan manusiawi bagi orang-orang yang baru mendarat; dan
- Meningkatkan angka pemindahan ke negara ketiga bagi pengungsi dari Indonesia - khususnya untuk anak-anak yang tak memiliki pendamping.






# LEBIH BAIK MENYALAKAN LILIN DARIPADA MENGUTUK KEGELAPAN

## HUBUNGI KAMI

 [info@amnesty.org](mailto:info@amnesty.org)

 +44 (0)20 7413 5500

## IKUT DALAM PERCAKAPAN

 [www.facebook.com/AmnestyGlobal](https://www.facebook.com/AmnestyGlobal)

 @AmnestyOnline

# PERJALANAN MEMATIKAN

## KRISIS PENGUNSI DAN PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA

Pada bulan Mei 2015 tiga perahu berisi 1,800 perempuan, laki-laki, dan anak-anak mendarat di Aceh, Indonesia. Kebanyakan penumpang tersebut adalah Rohingya Muslim, sebuah kelompok minoritas agama dan etnis dari Myanmar.

Mereka yang tiba telah melewati berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan di laut, dalam perahu yang penuh sesak, dikontrol oleh pedagang manusia yang kejam dan penyelundup yang keji. Laporan ini mencakup kesaksian para Rohingya tentang kondisi mengejutkan dan penganiayaan hak asasi manusia yang mereka derita di perahu selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan sebelum berakhir, termasuk pembunuhan dan pemukulan ketika mereka disekap untuk diminta tebusan.

Perahu-perahu yang mencapai Aceh merupakan bagian dari puluhan perahu yang telah ditelantarkan di laut oleh awak mereka setelah Thailand mengumumkan razia pemberantasan perdagangan manusia pada awal bulan Mei 2015. Setelah mendapat kritik secara internasional, Indonesia dan Malaysia mengizinkan orang-orang tersebut mendarat, namun hanya sementara hingga Mei 2016. Indonesia telah memberikan dukungan yang sangat diperlukan dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil lokal dan badan-badan internasional untuk memenuhi kebutuhan dasar para Rohingya namun masa depan mereka tetap tidak menentu.

Musim berlayar Asia Tenggara berlanjut ketika laporan ini diselesaikan pada Oktober 2015, setelah musim monsoon berakhir. Pemerintah, khususnya Indonesia, Malaysia dan Thailand, harus mengambil tindakan darurat untuk mengatasi krisis pengungsi dan perdagangan manusia Asia Tenggara. Pemerintah di wilayah tersebut harus mengambil tindakan terkoordinasi melawan perdagangan manusia dengan cara yang tidak menempatkan nyawa atau hak asasi manusia seseorang dalam bahaya. Komunitas internasional harus memberikan bantuan teknis, dukungan pendanaan dan komitmen pemindahan ke negara ketiga pada tingkat yang bermakna.